

88

Milik Depdik  
Tidak diperdagangkan



**SEJARAH LOKAL**

**PERANAN RAKYAT BESUKI**  
**(JAWA TIMUR)**  
**PADA MASA PERANG KEMERDEKAAN**  
**1945 - 1950**

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
JAKARTA  
2001

**SEJARAH LOKAL**  
**PERANAN RAKYAT BESUKI (JAWA TIMUR)**  
**PADA MASA PERANG KEMERDEKAAN**  
**1945 - 1950**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**  
**JAKARTA**  
**2001**

**PENULISAN SEJARAH LOKAL : PERANAN RAKYAT BESUKI  
(JAWA TIMUR) PADA MASA PERANG KEMERDEKAAN**

Penulis : Dra. G.A. Ohorella

Drs. Restu Gunawan

Penyunting : Drs. P. Suryo Haryono

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang

Diterbitkan oleh : Proyek Peningkatan Kesadaran Sejarah Nasional Direktorat  
Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan Nasional

Jakarta 2001

Edisi I

Dicetak oleh : CV. SUKOREJO BERSINAR

## **SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN**

Karya-karya sejarah dengan berbagai aspek yang dikaji dan ditulis melalui Proyek Peningkatan Kesadaran Sejarah Nasional (Proyek PKSN), dimaksudkan untuk disebarluaskan ke tengah-tengah masyarakat. Tujuannya adalah untuk memberikan bahan informasi kesejarahan kepada masyarakat. Dengan demikian diharapkan banyak pihak akan menambah pengetahuannya tentang sejarah, baik yang menyangkut akumulasi fakta maupun proses peristiwa. Di samping itu, para pembaca juga akan memperoleh nilai-nilai kesejarahan, baik mengenai kepahlawanan, kejuangan, maupun perkembangan budaya yang terungkap dari paparan yang terdapat dalam karya-karya sejarah itu.

Kami menyadari bahwa buku-buku karya Proyek PKSN itu tidak luput dari berbagai kelemahan: isi, bahasa, maupun penyajiannya, namun kami meyakinkan pembaca bahwa kesalahan dan kelemahan itu tidaklah disengaja. Untuk itu, diharapkan kepada pembaca untuk memberikan kritik, saran perbaikan terhadap karya-karya Proyek PKSN ini. Kritik dan saran itu tentu akan sangat berguna untuk memperbaiki karya-karya proyek ini.

Kepada para penulis yang telah menyelesaikan tugasnya dan kepada semua pihak yang ikut serta, baik langsung

maupun tidak langsung dalam mewujudkan karya-karya  
Proyek PKSN sebagaimana adanya ditangan pembaca, kami  
sampaikan terima kasih.

Jakarta, September 2001

**Direktur Jenderal Kebudayaan**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'IGN. Anom', written over a horizontal line.

**IGN. Anom**  
NIP 130353848

## PENGANTAR

Buku *Sejarah Lokal : Peranan Rakyat Besuki (Jawa Timur) Pada Masa Perang Kemerdekaan* ini merupakan salah satu hasil pelaksanaan kegiatan penelitian penulisan yang diselenggarakan Proyek Peningkatan Kesadaran Sejarah Nasional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2001.

Buku ini menguraikan tentang geografis, sosial, ekonomi, budaya, susunan kegiatan Pemerintah Daerah Jawa Timur pada masa Perang Kemerdekaan dan Besuki selama masa revolusi.

Penerbitan buku ini dimaksudkan untuk menambah informasi kesejarahan mengenai peran serta masyarakat dalam masa pembangunan dalam perjalanan bangsa Indonesia pada umumnya.

Diharapkan dengan terbitnya buku ini dapat menambah khasanah sejarah Indonesia dan memberi informasi yang memadai bagi mereka yang berminat, dan dapat menjadi bahan peningkatan kesadaran sejarah masyarakat terutama generasi penerus bangsa.

Jakarta, September 2001

**Pemimpin Proyek Peningkatan  
Kesadaran Sejarah Nasional**



**Wiwi Kuswiah**  
NIP 131125902

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN .....</b>	v
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	vii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	ix
<b>Bab I    Pendahuluan .....</b>	1
<b>Bab II   Kondisi Geografis, Sosial dan Ekonomi           Daerah Besuki</b>	
2.1   Kondisi Geografis .....	5
2.2   Kondisi Ekonomi .....	8
2.3   Kondisi Sosial dan Budaya .....	11
<b>Bab III  Susunan dan Kegiatan Pemerintah Daerah           Jawa Timur Pada Masa Perang Kemerdekaan</b>	
3.1   Susunan Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan Eks Karesidenan Surabaya .....	14
3.2   Pemerintahan Eks Karesidenan Kediri .....	19
3.3   Pemerintahan Eks Karesidenan Malang .....	24
3.4   Pemerintahan Eks Karesidenan Madiun .....	27
3.5   Pemerintahan Eks Karesidenan Bojonegoro ....	31
3.6   Pemerintahan Eks Karesidenan Besuki .....	33

3.7	Sistem Pemerintahan di Besuki Pada Masa Kolonial .....	34
3.8	Susunan Pemerintahan di Besuki Setelah Negara Republik Indonesia Berdiri .....	37
3.9	Pemerintahan Eks Karesidenan Madura .....	39
<b>Bab IV</b>	<b>Besuki Selama Masa Revolusi</b>	
4.1	Belanda Menyerang Besuki .....	43
4.2	Penyempurnaan Organisasi Kemiliteran di Jawa Timur.....	45
4.3	Pendudukan Daerah-daerah Penting di Wilayah Besuki.....	48
4.4	Kisah Jatuhnya Kota-kota Penarukan, Situbondo,Besuki, Bondowoso, Jember dan Banyuwangi.....	60
4.5	Kisah Gerbong Maut .....	60
4.6	Jawa Timur Kembali Ke Pangkuan RI. ....	66
<b>Bab V</b>	<b>Penutup</b> .....	69
	<b>Daftar Pustaka</b> .....	73

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Sejak kemerdekaan Indonesia diproklamlirkan telah terjadi perubahan yang sangat fundamental dalam bidang politik atau pemerintahan. Struktur masyarakat berubah dari masyarakat jajahan menjadi masyarakat merdeka. Lebih dari itu didalam masyarakat terjadi pergeseran-pergeseran status. Proklamasi kemerdekaan nampaknya baru merupakan langkah awal dari upaya untuk menegakkan kedaulatan negara. Sejak itu bangsa Indonesia sudah harus menghadapi Belanda yang bermaksud menguasai kembali wilayah Indonesia, yang berakibat perselisihan antara Indonesia dan Belanda tidak dapat dihindarkan. Seiring dengan masalah itu di berbagai daerah, massa melakukan pemberontakan melawan pemerintah Indonesia yang belum begitu kuat untuk berdiri sebagai bangsa.

Niat Belanda menguasai wilayah Indonesia nampaknya tidak main-main. Hal ini nampak dengan tindakannya dua kali melakukan serangan terhadap Indonesia. Pemerintah Indonesia dalam usahanya mengusir Belanda dari persada Indonesia menempuh jalan perundingan dan perang gerilya, namun pihak Belanda tidak pernah merasa puas dengan hasil yang dicapai di meja perundingan sehingga secara sepihak Belanda melakukan agresi militer. Berhubung pihak Indonesia menyadari akan

keterbatasan dalam bidang persenjataan yang dirasa tidak mampu mengimbangi senjata Belanda, maka usaha terbaik untuk menghadapi kekerasan Belanda ialah dengan sistem perang gerilya. Cara diplomasi dan perjuangan bersenjata itu dijalankan sampai akhirnya Belanda meninggalkan wilayah Indonesia. Dengan demikian pengertian revolusi dalam konteks Indonesia seperti yang dimaksud dalam tulisan ini adalah proses politik yang diwarnai dengan konflik antar golongan politik, pemberontakan massa terhadap golongan yang berkedudukan dan perjuangan menegakkan kemerdekaan yang akhirnya menciptakan negara Indonesia.

Serangan Belanda secara tiba-tiba terhadap Ibukota Republik Indonesia pada 21 Juli 1947 dan 19 Desember 1948 memaksa tentara Indonesia meninggalkan kota dan tinggal di pedesaan. Mereka menyusun strategi untuk menghadapi tentara Belanda dari desa-desa. Dalam tulisan ini akan dibahas bagaimana perjuangan rakyat Besuki melawan penjajah Belanda dan bagaimana struktur pemerintahannya selama masa-masa perjuangan tersebut.

Besuki sebagai daerah yang sangat kaya telah menjadi sasaran utama bagi Belanda. Daerah Besuki sebagai daerah ujung timur Jawa Timur merupakan daerah yang sangat strategis untuk menguasai daerah-daerah lainnya di Jawa Timur. Dengan menguasai Besuki dan Pelabuhan Ketapang maka akses pasukan yang datang dan pergi ke Bali maupun sebaliknya dapat berjalan lancar. Sehingga bantuan pasukan maupun bahan makanan dapat berjalan lancar.

Selain itu pada masa perjuangan masa revolusi ini telah terjadi perubahan-perubahan dalam sistem pemerintahannya. Di Jawa dan Madura dibagi menjadi tiga daerah pemerintahan pangreh praja oleh Belanda. Yang tertinggi disebut *gewest* atau dapat juga disebut gubernuran. *Gewest* ini meliputi beberapa *residensi* yang dipimpin oleh seorang residen. Karesidenan dibagi menjadi beberapa *afdeling* yang dipimpin oleh seorang *regent* (bupati) dan dibantu oleh seorang patih. Kabupaten dibagi lagi menjadi *district* (kewedanan) yang masing-masing dipimpin oleh seorang

wedana. Tiap-tiap *district* dibagi atas beberapa *onderdistrict* (kecamatan) yang dipimpin oleh seorang asisten wedana. Masing-masing *onderdistrict* meliputi beberapa desa yang dipimpin oleh seorang kepala desa.

Selanjutnya pada masa Jepang berkuasa di Indonesia dalam dekonsentrasi pemerintahannya sebagian besar masih mengikuti susunan pemerintahan Hindia Belanda. Hanya pembagian administrasi menurut propinsi yang dihapuskan. Sejak 8 Agustus 1942 pulau Jawa dibagi dalam 17 *syuu* (semacam *residentie*) sedangkan di bekas daerah Propinsi Jawa Timur waktu itu muncul *syu-syu* seperti *Syuu* Surabaya, Bojonegoro, Madiun, Besuki dan lain sebagainya.

Dalam organisasi pemerintahan setelah kemerdekaan, lembaga gubernur dihidupkan kembali. Sidang PPKI telah memutuskan bahwa untuk sementara waktu dibentuk delapan propinsi dengan gubernur sebagai wakil pemerintahannya. Propinsi Jawa Timur pada waktu itu meliputi karesidenan yaitu Karesidenan Surabaya, Bojonegoro, Madiun, Kediri, Besuki, Malang dan Madura. Semasa perang kemerdekaan jalannya pemerintahan tidak bisa berjalan normal. Karena setiap Belanda menyerang daerah pendudukan maka terpaksa seluruh unsur birokrasi pemerintahan harus menyingkir ke desa-desa dan bahkan gunung-gunung. Hal ini juga terjadi untuk wilayah-wilayah di Jawa Timur. Begitu Juga di Besuki. Akibat hampir seluruh wilayah Besuki dikuasai Belanda maka pemerintahan dijalankan dengan berpindah-pindah dari desa satu ke desa yang lain.

Sehingga desa telah menjadi pusat perjuangan melawan penjajah. Kota-kota mulai ditinggalkan untuk kemudian rakyat dan tentara bersatu melawan penjajah. Desa sebagai pusat perjuangan menjadikan rakyat merasa keterlibatannya dalam perjuangan sangat penting. Sehingga aktivitas rakyat pedesaan menjadi bertambah antara lain para pemuda menjadi terlibat dalam pengawasan keamanan desa. Sedangkan masyarakat lainnya ikut pula terlibat dalam penyediaan bahan makanan untuk kepentingan perang. Di sinilah arti perjuangan rakyat pada masa itu di mana rakyat dan tentara bergabung menjadi satu melawan penjajah.

## BAB II

### KONDISI GEOGRAFIS, SOSIAL DAN EKONOMI DAERAH BESUKI

#### *2.1 Kondisi Geografis*

Karesidenan Besuki terletak kurang lebih di antara  $113^{\circ}$  dan  $114^{\circ}75$  bujur timur dan  $7,70$  sampai  $8,85$  lintang selatan, merupakan ujung timur dari pulau Jawa. Dari batas Karesidenan Pasuruan sampai batas ujung pantai timur diperkirakan panjangnya 150 pal, sedangkan lebar dari pantai utara sampai pantai selatan diperkirakan 50 pal, dan luas seluruh wilayah diperkirakan 7500 pal.

Daerah *regentschap* Probolinggo dan Besuki memiliki hawa yang sejuk. Di pegunungan bagian selatan suhu udara dapat mencapai  $85^{\circ}$  F, sedang di daerah dataran rendah di tepi pantai kadang-kadang mengalami hawa panas sampai  $95^{\circ}$  F. Hal ini menyebabkan daerah Banyuwangi mempunyai hawa kurang sehat yang disebabkan oleh banyaknya sungai-sungai yang berhulu di gunung-gunung, dekat dengan gunung api dan diperkirakan banyak menyebabkan berbagai unsur-unsur bahaya tercampur dengan air yang mengalir dan juga disebabkan oleh asap-asap yang bersumber dari gua-gua dan jurang-jurang yang lebat hutannya, sehingga hawa menjadi lebih panas ditimpakan pada

dataran-dataran rendah, akibatnya menimbulkan gangguan terhadap kesehatan penduduk di wilayah itu.

Sungai-sungai yang ada di daerah Karesidenan Besuki kurang begitu besar artinya untuk melayani pelayaran tidak bisa tetapi kegunaannya lebih sebagai alat untuk irigasi bagi pertanian di Besuki. Sungai yang besar terletak di sebelah utara bernama Kali Sampean yang hulunya berasal dari daerah Bondowoso dan bermuara di Pantai Penarukan, sungai itu hanya dapat dilayari perahu kecil dan sedang saja. Di pantai selatan di daerah distrik Puger bertemu beberapa sungai menjadi satu langsung bermuara ke laut selatan. Sungai yang lain seperti yang terdapat di distrik Tengger mempunyai sungai-sungai pegunungan yang berair hanya pada musim hujan. Daerah distrik Tengger selalu dihinggapi kabut-kabut dan dibasahi embun dan banyak terdapat jurang-jurang yang sangat dalam dan dapat menampung air, keadaannya dipengaruhi oleh Gunung Bromo yang masih aktif.

Di daerah Karesidenan Besuki banyak dijumpai danau-danau terutama di sekitar gunung Lamongan, yang keadaannya masih aktif. Daerah itu termasuk wilayah daerah *regentschap* Probolinggo, yang menurut letaknya dan sifatnya diduga berasal dari kawah yang terdorong ke bawah. Terhadap danau-danau itu belum dimanfaatkan untuk pertanian, hanya memberikan suatu pemandangan yang indah, danau-danau itu bernama Ranu Pakis, Ranu Pedali, Ranu Klakah, Ranu Yoso, Ranu Tiris Wetan, Ranu Tiris Kulon dan Ranu Gong.

Gunung-gunung yang terdapat di karesidenan ini merupakan suatu deretan vulkanik sepanjang pulau Jawa, berderet dari Jawa Barat sampai ujung timur Pulau Jawa, bahkan berlanjut ke kepulauan Nusa Tenggara. Daerah Karesidenan Besuki paling barat adalah deretan pegunungan yang dinamakan Pegunungan Tengger. Pegunungan Tengger terdiri dari beberapa puncak gunung seperti Gunung Bromo, yang masih aktif, Gunung Pananjakan, Gunung Widodaren dan Gunung Ider-Ider, pegunungan ini sebagian besar terletak di wilayah Karesidenan Pasuruan dan sebagian lain berada di wilayah *regentschap*

Probolinggo, Karesidenan Besuki. Di sebelah timur Pegunungan Tengger terdapat Gunung Lamongan dan Pegunungan Iyeng dengan beberapa gunung seperti Gunung Raung, Gunung Suket, Gunung pendil dan yang paling timur adalah Gunung Merapi.

Dataran-dataran yang terdapat di wilayah Karesidenan Besuki antara lain dataran rendah sepanjang pantai dari sebelah barat Kota Probolinggo terhampar ke timur sampai sekitar Paiton. Selanjutnya dataran rendah terdapat di sekitar Kota Besuki sampai Pelandingan dan di timurnya diselingi oleh sebuah gunung, kemudian terhampar lagi dataran rendah di sekitar Kota Penarukan sampai ke Kota Jember dan di sebelah barat Puger di tepi pantai terdapat Kota Banyuwangi, selatan ke wilayah distrik Rogojampi sampai ke pantai selatan. Daerah Karesidenan Besuki wilayahnya separoh merupakan pegunungan dengan gunung-gunung yang banyak dalam keadaan masih aktif, selebihnya dataran rendah yang terdapat di bagian utara, di bagian selatan dan tenggara, sekitar pantai yang merupakan daerah subur dan menghijau.

Di daerah Besuki hutan-hutan sangat luas dan terdapat hutan-hutan yang sangat lebat, dengan demikian cukup tersedia kayu-kayu, baik kayu untuk bangunan maupun untuk bahan bakar pabrik-pabrik. Pengangkutan kayu merupakan hal yang paling sulit karena luasnya hutan-hutan dan letaknya di pedalaman, yang jarak jauhnya dari jalan-jalan sepanjang pantai hanya sekitar 8 - 10 pal. Berhubung kurangnya sungai yang dapat dilayari diperlukan jalan-jalan darurat untuk dapat mengangkut kayu-kayu yang dibutuhkan. Karesidenan Besuki karena wilayahnya sebagian besar dikelilingi pantai, artinya daerah Besuki kebanyakan adalah berbatasan dengan pantai, banyak terdapat teluk-teluk dan tanjung di sepanjang pantainya. Pelabuhan laut yang dapat melayani bongkar muat barang adalah Pelabuhan Probolinggo, Besuki, Pelabuhan Penarukan dan Pelabuhan Banyuwangi.

Dengan keadaan geografis seperti itu maka Karesidenan Besuki adalah daerah yang vital baik dilihat dari sumber alamnya maupun keadaan geografisnya. Alam yang subur memungkinkan

adanya sumber pertanian yang melimpah baik padi, gula maupun tembakau. Sedangkan pelabuhannya dapat menjamin pendapatan karena padatnya bongkar muat barang di pelabuhan-pelabuhan tersebut.

## ***2.2 Kondisi Ekonomi***

Dalam masyarakat yang struktur sosialnya bersifat feodal, raja, dan keluarga bangsawan berkedudukan sebagai tuan atau elit birokrasi sedang rakyat kecil sebagai kawula. Demikian juga di Besuki sebagai daerah kerajaan mancanegara maka pengaruh kerajaan masih terasa di daerah ini. Di daerah gubernemen tugas-tugas abdi adalah melayani keperluan-keperluan para Bupati dan dalam sistem pemerintahan tidak langsung penguasa kolonial berada pada kedudukan di atas penguasa pribumi dengan segala macam hak-haknya yang istimewa. Bagi rakyat hal itu sebagai beban yang semakin berat, lebih-lebih karena penguasa kolonial mempunyai tuntutan yang tidak dikenal dalam ikatan-ikatan tradisional. Dengan kekuasaan politik kolonial Belanda melakukan berbagai tuntutan melalui penguasa pribumi yang selanjutnya terus ditimpakan kepada rakyat desa. Bupati sebagai penguasa mempunyai tuntutan terhadap produksi agraris tidak juga atas pengaruh dan kekuasaannya, sehingga petani wajib menyerahkan sebagian hasil tanahnya dan tenaganya kepada penguasa di atasnya yang merasa mempunyai hak milik atas tanah yang digarapnya.

Dalam penggunaan dan penguasaan tanah, kepala desa mempunyai kedudukan strategis, karena kedudukan dia sangat ditentukan oleh adanya tanah. Dengan semakin banyaknya upeti yang ditarik dari rakyat yang disetorkan kepada atasannya maka kedudukannya semakin kuat.

Oleh karena itu pada masa penjajahan, struktur masyarakat Karesidenan Besuki memiliki empat tingkat yaitu pertama penguasa kolonial yang berada di puncak; kedua, para bupati beserta pembantunya; ketiga, di bawah bupati adalah para kepala desa yang merupakan aparat birokrat paling bawah. Sedangkan

terakhir adalah rakyat kecil dengan tanah yang sempit dan tidak mempunyai jabatan struktural di tingkat desa.

Rakyat kecil ini sangat besar perannya dalam menentukan kehidupan atasannya. Karena selain sebagai pembayar upeti terbesar mereka juga diwajibkan menjalankan kerja wajib untuk atasannya. Selanjutnya, dapat dikatakan, bahwa masyarakat Karesidenan Besuki memiliki ikatan vertikal sebagai ikatan atas-bawah dan ikatan horisontal sebagai ikatan persaudaraan antara anggota masyarakat desa itu sendiri. Ikatan vertikal dan ikatan desa yang bersifat horisontal merupakan alat pendukung utama sistem ekonomi kolonial yang berlangsung pada masa penjajahan Belanda.

Sementara itu sektor ekonomi di daerah Besuki masih mengandalkan tanah sebagai aset utamanya. Artinya tanah dijadikan sumber utama pendapatan rakyat dan birokrasi daerah. Tanah yang terdapat di Besuki dapat diklasifikasikan menjadi tanah sawah dan tanah tegalan. Bagi petani Jawa yang terpenting untuk mempertahankan hidupnya adalah tanah pertanian sawah, sedang tanah pertanian kering masih dianggap tanah kelas kedua.

Sebagai akibat tanah yang luas maka pihak kompeni sebagai penyangga ekonominya mengandalkan keberadaan tanah ini. Kaum penjajah mulai memperkenalkan beberapa tanaman komoditas ekspor. Pertama adalah penanaman kopi. Penanaman kopi di Besuki sudah diperkenalkan sejak tahun 1818. Pada tahun 1924 terhadap penanaman kopi sudah dikenai pajak dengan klasifikasi pohon. Pohon jenis pertama pajaknya 2 kati per pohon, pohon kopi jenis kedua pajaknya satu setengah kati per pohon, jenis ketiga dibebani pajak setengah kati per pohon dan kopi-kopi yang ditanam di pagar yang dikenal dengan kopi pagar dibebani pajak 1 kati per pohon.

Penanaman pohon kopi di Besuki pada awalnya mengalami kesulitan karena kurangnya tenaga kerja untuk menanam dan memelihara tanaman. Namun akibat tanam paksa akhirnya tenaga dan lahan pertanian menjadi tersedia.

Selain kopi, Belanda di daerah Besuki juga memperkenalkan tanaman tebu. Pada waktu itu hampir di seluruh Jawa penanaman tebu sedang ditingkatkan sebanyak-banyaknya. Daerah-daerah tersebut antara lain Priangan, Cirebon, Semarang, Surakarta, Jember, Madiun dan Bojonegoro. Akibatnya di daerah-daerah tersebut banyak didirikan tempat pengolahan tebu. Pendirian pabrik tebu ini diharapkan dapat menghemat pengeluaran tenaga yang akan dikeluarkan untuk proses produksi.

Untuk menggalakkan usaha penanaman tebu ini maka diadakan persetujuan-persetujuan dengan desa-desa untuk menanam dan memelihara tebu dan menyerahkan pekerjaan-pekerjaan serta kayu-kayu bakar kepada pabrik-pabrik. Di daerah-daerah yang diperoleh dari raja-raja maka penanaman didasarkan atas perintah penguasa desa yang dianggapnya sebagai utusan raja.

Pemerintah kolonial Belanda mengadakan persetujuan-persetujuan dengan pengusaha-pengusaha swasta untuk mendirikan pabrik-pabrik pengolahan tebu menjadi pengolahan gula dan penyerahan gulanya kepada pemerintah kolonial. Pada mulanya sukar untuk mendapat pengusaha-pengusaha yang bersedia untuk mengadakan kontrak-kontrak dengan melalui tekanan-tekanan dari residen, baru dapat dilakukan kontrak-kontrak dengan orang-orang Tionghoa. Kenyataannya kontrak-kontrak itu sangat menguntungkan pihak pabrik, sehingga banyak yang berminat ikut menutup kontrak. Adanya keuntungan pemilik pabrik dalam kontrak-kontrak gula dengan penguasa kolonial cepat menarik keinginan orang-orang Eropa untuk ikut menanamkan modal di Jawa. Di Besuki penanaman tebu dimulai tahun 1830 secara besar-besaran dengan mempergunakan tanah sawah seluas 700 bau dan pada tahun berikutnya dikembangkan terus menjadi penanaman tebu yang cukup luas. Sehingga daerah Besuki menjadi penghasil gula yang cukup besar untuk Jawa.

Selain itu, Belanda juga giat mengadakan penanaman nila. Di karesidenan Besuki pada tahun 1832 penanaman nila sudah dimulai. Rakyat Besuki kurang tertarik dalam penanaman nila

ini karena para petani sudah sibuk dengan penanaman kopi dan tebu selain tanaman bahan makanan. Namun demikian di Besuki pengenalan tanaman baru sangat giat dilakukan oleh Belanda. Hanya hasilnya tidak begitu besar. Tanaman tersebut antara lain murbei, tembakau, teh dan kapas. Dari hasil penanaman tanaman baru tersebut hasilnya di daerah Besuki berdiri pabrik-pabrik pengolahan hasil tanaman hanya kapasitasnya relatif kecil.

### ***2.3 Kondisi Sosial dan Budaya***

Letak Besuki yang merupakan daerah transit telah menumbuhkan dinamika tersendiri bagi perkembangan masyarakat dan kebudayaannya. Lancarnya arus perhubungan menyebabkan semakin intensifnya kontak antar budaya. Dengan sendirinya pengaruh-pengaruh budaya luarpun banyak memasuki kehidupan masyarakatnya. Daerah ini merupakan daerah pusat pertumbuhan Islam sehingga sampai sekarang kebudayaan dan adat istiadatnya banyak mendapatkan pengaruh dari kebudayaan Islam.

Mengenai penganut agama Islam di Jawa menurut Clifford Geertz mengemukakan bahwa penganut agama Islam di Jawa dapat digolongkan ke dalam dua golongan santri dan abangan. Dengan mengacu pada konsep tersebut maka di Besuki meskipun sebagian besar penganut Islam namun mereka terdiri dari dua tipologi agama Islam tersebut. Meskipun agama Islam telah dianut oleh sebagian besar penduduk akan tetapi sistem kepercayaan asli mereka masih dianut. Karena sistem kepercayaan ini sebenarnya telah mereka anut jauh sebelum Islam masuk. Sehingga upacara-upacara yang sifatnya berhubungan dengan penguasa laut maupun penguasa alam masih terus dilakukan.

Karena keadaan alam yang agraris maka sebagian besar penduduk Besuki bermata pencaharian sebagai petani. Sedangkan penduduk yang tinggal di pantai umumnya menjadi nelayan yang menangkap ikan di laut dan sebagai petani garam. Banyak pula di antara mereka yang bekerja sebagai pedagang.

Pertanian padi yang dikerjakan kebanyakan dengan pengairan teknis. Hal ini terkait dengan terdapatnya sungai-sungai yang mengalir di daerah Besuki. Sedangkan tanaman yang ditanam di ladang adalah tanaman palawija seperti jagung, ketela, ubi dan kacang-kacangan. Usaha di bidang perikanan laut dikerjakan oleh penduduk di sepanjang pesisir pantai yaitu berternak udang windu dan peternakan nener (anak ikan).

### BAB III

## SUSUNAN DAN KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH JAWA TIMUR PADA MASA PERANG KEMERDEKAAN

Pada masa perjuangan revolusi telah terjadi perubahan-perubahan dalam sistem pemerintahan. Di Jawa dan Madura dibagi menjadi tiga daerah pemerintahan pangreh praja oleh Belanda. Yang tertinggi disebut *gewest* atau dapat juga disebut gubernuran. *Gewest* ini meliputi beberapa residensi yang dipimpin oleh seorang residen. Karesidenan dibagi menjadi beberapa *afdeling* yang dipimpin oleh seorang *regent* (bupati) dan dibantu oleh seorang patih. Kabupaten dibagi lagi menjadi *district* (kewedanan) yang masing-masing dipimpin oleh seorang wedana. Tiap-tiap *district* dibagi atas beberapa *onderdistrik* (kecamatan) yang dipimpin oleh seorang asisten wedana. Masing-masing *onderdistrik* meliputi beberapa desa yang dipimpin oleh seorang kepala desa.

Selanjutnya pada masa Jepang berkuasa di Indonesia dalam dekonsentrasi pemerintahannya sebagian besar masih mengikuti susunan pemerintahan Hindia Belanda. Hanya pembagian administrasi menurut propinsi yang dihapuskan. Sejak 8 Agustus 1942 pulau Jawa dibagi dalam 17 *syuu* (semacam *residentie*) sedangkan di bekas daerah Propinsi Jawa Timur waktu itu muncul *syuu-syuu* seperti *Syuu* Surabaya, Bojonegoro, Madiun, Besuki dan lain sebagainya.

Dalam organisasi pemerintahan setelah kemerdekaan, lembaga gubernur dihidupkan kembali. Sidang PPKI telah memutuskan bahwa untuk sementara waktu dibentuk delapan propinsi dengan gubernur sebagai wakil pemerintahannya. Propinsi Jawa Timur pada waktu itu meliputi karesidenan yaitu Karesidenan Surabaya, Bojonegoro, Madiun, Kediri, Besuki, Malang dan Madura. Semasa perang kemerdekaan jalannya pemerintahan tidak bisa berjalan normal. Karena setiap Belanda menyerang daerah pendudukan maka terpaksa seluruh unsur birokrasi pemerintahan harus menyingkir ke desa-desa dan bahkan gunung-gunung. Hal ini juga terjadi untuk wilayah-wilayah di Jawa Timur. Begitu juga di Besuki. Akibat dikuasainya hampir seluruh wilayah Besuki dikuasai Belanda maka pemerintahan dijalankan dengan berpindah-pindah dari desa satu ke desa yang lain.

### ***3.1 Susunan Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan Pemerintah Eks Karesidenan Surabaya***

Pemerintah Propinsi Jawa Timur berdasarkan UUD 1945 ternyata tumbuh dan berkembang bersama pemerintah Karesidenan Surabaya. Karena ketika Jepang menyerah kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945, Jawa Timur tidak mempunyai ibukota propinsi. Pada tanggal 1 Juli 1928 Jawa Timur ditetapkan sebagai *gewest*, sebuah nama daerah administratif di bawah gubernur dan kemudian mulai tanggal 1 Januari 1929 dibentuk sebagai propinsi. Berdasarkan *staatblad* tahun 1939 No. 287/289 Propinsi Jawa Timur terdiri atas 7 karesidenan yaitu Karesidenan Surabaya, Karesidenan Bojonegoro, Keresidenan Madiun, Karesidenan Besuki, Karesidenan Madura. Tiap-tiap karesidenan dikepalai oleh seorang residen, kepala *afdeling* (*resident afdeling hoofd*). Bentuk propinsi ini oleh tentara Jepang dihapuskan.

Dengan begitu pemerintah tertinggi yang ada di Surabaya ketika zaman Jepang sampai Jepang menyerah adalah Karesidenan Surabaya atau Surabaya *Syuu* dengan residennya

orang Indonesia bernama R. Sudirman. Pada zaman Jepang di Jawa Timur dibagi menjadi 7 karesidenan (*Syu*) yaitu: Surabaya *Syu*, Kediri *Syu*, Malang *Syu*, Madiun *Syuu*, Bojonegoro *Syuu*, Besuki *Syuu*, dan Madura *Syuu*.

Pejabat-pejabat sipil Republik Indonesia di Surabaya setelah proklamasi adalah Wakil Residen R. Sudirman dan Komandan Pasukan Polisi Istimewa Surabaya Inspektur II Moch Jasin. Sebagai tindak lanjut rapat PPKI tanggal 22 Agustus 1945 di Jakarta yang menetapkan pembentukan Komite Nasional Indonesia yang isinya antara lain:

- a. Komite Nasional dibentuk di seluruh Indonesia dengan pusatnya di Jakarta,
- b. Komite Nasional Indonesia adalah penjelmaan kebulatan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia berdasarkan kedaulatan rakyat,
- c. Usaha Komite Nasional adalah menyatakan kemauan rakyat Indonesia untuk hidup sebagai bangsa yang merdeka, mempersatukan rakyat dari segala lapisan dan jabatan supaya terpadu pada tempat di seluruh Indonesia persatuan kebangsaan yang bulat dan erat, membantu pimpinan dalam menyelenggarakan cita-cita bangsa Indonesia dan di daerah membantu pemerintah daerah untuk kesejahteraan umum. Komite Nasional di pusat memimpin dan memberi petunjuk kepada Komite-Komite Nasional di daerah. Di mana perlu di daerah didirikan pusat yaitu untuk Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Sunda Kecil dan Maluku dan komite nasional di pusat-pusat dan daerah-daerah dipimpin oleh seorang ketua dan beberapa orang pengurus yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat. Untuk pertama kalinya ketua KNI Pusat ditetapkan oleh Pimpinan Besar Presiden Sukarno.
- d. Instruksi Presiden untuk pembentukan Komite Nasional di daerah jatuh tanggal 22 Agustus 1945. Di Surabaya dengan dipelopori oleh angkatan muda diadakan rapat persiapan

pembentukan KNI di gedung nasional (GNI) Bubutan selama 3 hari terus menerus. Dimulai pada tanggal 25 Agustus 1945 hari Sabtu, dan berakhir pada hari Senin Tanggal 27 Agustus 1945.

Susunan anggota KNI Karesidenan Surabaya yang mewakili seluruh kelompok masyarakat personalianya adalah Ketua Dul Arnowo, Wakil Ketua Bambang Suparto dan Mr. Dwijosewojo, anggota RAA Suyadi, Mr. Masmuin, Subekti Pusponoto, Setiono, Rajiman Nasution, Gusti Mayor J.H.W. Trumpi, Dr. Siwabesy, Ir. Darmawan Mangunkusumo, Kustur, Anwar Zein, Dr. Angka Nitisastro, Hn, Thahir Bakri, H. Abdul Karim, Sudarno Natajaya, Abdoel Wahab, Ny. Sumeti, Suparno, Suji, dan H. Zarkasi.

Untuk menyambut sidang pertama KNIP di Jakarta dari tanggal 29 sampai 31 Agustus 1945, KNI Karesidenan Surabaya mengumumkan kepada rakyat agar mengibarkan bendera merah putih. Pengumuman tersebut disambut dengan serentak di Surabaya, sehingga bendera merah putih berkibar di seluruh penjuru kota Surabaya, sedangkan pemerintah pusat mengeluarkan maklumat pengibaran bendera baru tanggal 1 September 1945. Jadi Surabaya mendahului Jakarta atau Pusat Pemerintah. Ruslan Abdulgani menyebut pengibaran bendera merah putih sebagai *Flaggen Actie* (aksi bendera).

Sebelumnya pada tanggal 20 Agustus 1945 dengan dipelopori oleh agen polisi III Nainggolan telah diadakan pengibaran bendera merah putih di Asrama Polisi Istimewa di *Coen Boulevard* Surabaya.

Selanjutnya pada tanggal 27 Agustus Residen Surabaya berangkat ke Jakarta memenuhi panggilan untuk menghadiri sidang pertama KNIP dan permusyawaratan pegawai negeri. Pada tanggal 2 September 1945 di Surabaya telah dibentuk BKR yang anggota dan pimpinannya terdiri dari bekas para anggota tentara PETA. Pada sore hari tanggal 3 September 1945, setelah mendengar kabar bahwa Residen Sudirman telah kembali dari Jakarta, maka Dul Arnowo mengutus beberapa orang bekas anggota PETA pergi ke rumah Residen Sudirman. Para perwira

tersebut antara lain Isa Edris, Kholil Thohir, Usman Aji, Yahya Hasyim, dan Abdul Wahab. Surat tersebut diserahkan kepada Residen Sudirman tanpa dibaca terlebih dahulu, surat itu langsung ditandatangani. Surat tersebut kemudian dikembalikan kepada Dul Arnowo.

Ternyata surat tersebut berisi Proklamasi Pemerintah Republik Indonesia Surabaya. Pada sore harinya surat tersebut langsung disebarluaskan ke Kabupaten Sidoarjo, Mojokerto, Jombang dan Lamongan. Proklamasi Daerah Surabaya tanggal 3 September 1945 itu antara lain berisi:

- a. Terhadap segala perbuatan yang menentang pemerintah Republik Indonesia diambil tindakan tegas
- b. Di seluruh daerah Surabaya bendera kebangsaan Indonesia sang merah putih harap dikibarkan.
- c. Keamanan dan ketenteraman umum dipegang dengan sekeras-kerasnya dan menurut peraturan yang berlaku sekarang.
- d. Terhadap pelanggaran peraturan tersebut oleh yang berwajib diambil tindakan tegas.
- e. Segala pekerjaan usaha dan urusan pemerintahan tetap berlangsung sebagai sedia kala sebelum ada penerapan lebih lanjut,
- f. Kepada seluruh penduduk diperintahkan untuk melakukan kewajiban sehari-hari dengan tenang saksama dan mengikuti disiplin
- g. Kepada semua badan-badan usaha dan perkumpulan-perkumpulan diperintahkan untuk bekerja terus dalam suasana kekeluargaan, saling membantu untuk keselamatan masyarakat dan penduduk umumnya.

Pada siang harinya Residen Sudirman mengadakan musyawarah dengan para pegawai kantor karesidenan untuk

menjelaskan situasi yang harus dihadapi oleh para pegawai Republik Indonesia. Dalam waktu yang tidak lama maka terbentuklah KNI kota Surabaya dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : Sumantri  
Wakil Ketua : Ruslan Wongsokusumo  
Anggota : Dr. Sugiri Sujamin dan Sudibyo

Sementara itu jabatan gubernur masih lowong, karena pemerintah Karesidenan Surabaya muncul terlebih dahulu, maka oleh pemerintah pusat, Residen Sudirman selanjutnya ditetapkan sebagai Wakil Gubernur dan menjabat sebagai Ketua KNI Jawa Timur sejak tanggal 28 September 1945. Secara resmi Gubernur Jawa Timur RMTA. Suryo, memegang jabatannya pada tanggal 12 Oktober 1945, setelah residen Sudirman dan para tokoh lainnya menegakkan pemerintahan RI di Surabaya.

Jumlah personel kantor residen Surabaya berjumlah 40 orang. Beberapa pejabat Karesidenan Surabaya antara lain : Mr. Ali Sastroamidjojo dengan pangkat *refendaris* bertugas mengurus personalia ; Mr. Sumardi, *refendaris*.

Dalam kegiatan pemerintahan ditugaskan untuk duduk sebagai salah seorang anggota panitia urusan bank yang dipimpin oleh akuntan Dr. Abutari

Wiyono Joyokusumo alias Oie Jien Kiem kepala pengawasan barang-barang milik pemerintah. Wiyono berkesempatan mendampingi Gubernur Suryo ketika Gubernur Suryo menyerahkan jenazah Jenderal Mallaby kepada Sekutu

Jarot Subiyantoro yang dalam perang kemerdekaan menjadi Komandan Batalyon Jarot dan setelah kemerdekaan menjadi Komandan KMKB Surabaya; Sugiyono sebagai wakil gubernur Jawa Timur; Subekti kepala perekonomian.

Ketika terjadi penyerangan oleh Belanda kantor gubernur pindah tempat ke Mojokerto, menempati *societet* atau kamar bola di sebelah selatan alun-alun Mojokerto. Kantor Karesidenan Surabaya menempati kantor asisten residen, sebelah timur alun-alun. Kantor gubernur akhirnya mundur lagi ke Malang dan ketika

terjadi Perang Kemerdekaan II, mundur lagi ke Blitar. Ketika kantor Gubernur berada di Malang bergabung pegawai Sutarwo dan Ngusman, dua orang pegawai yang kemudian setelah penyerahan kedaulatan tetap sebagai pegawai kantor gubernur dan memegang jabatan tertentu.

Selama terjadi perang 10 Nopember 1945 maka semua kantor dan jawatan terpaksa terhenti dan keadaan kocar kacir. Karena kantor besar polisi rusak dan beberapa kantor seksi polisi juga rusak maka mulai tanggal 11 Nopember 1945 diadakan penyusunan pegawai baru dan kantor pusat baru. Kantor gubernur dan karesidenan disusun kembali sedapat mungkin dan dibagi menurut keperluan dalam tiga bulan di Mojokerto (Pusat), perwakilan di Taman, perwakilan di kota, bersama-sama dengan pemerintahan kota. Antar tiga bagian itu tiap-tiap waktu diadakan perhubungan.

Keuangan yang masih bisa dihindarkan dari musuh maupun dari kebakaran. Makanan bagi penduduk dan tentara sudah diatur sebaik mungkin. Buat yang bertempur didatangkan makanan yang sudah masak dari luar kota Surabaya. Untuk itu di luar kota diadakan beberapa dapur umum. Bagi penduduk umum diusahakan juga pembagian makanan, karena terasa makin sempitnya kemungkinan masak sendiri.

Pemindahan penduduk diutamakan perempuan, anak-anak dan orang-orang tua. Orang laki-laki sedapat mungkin harus tinggal di kota untuk membantu perjuangan. Orang-orang sakit dan luka-luka mulai dipindahkan ke luar kota, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang dan kalau perlu keluar karesidenan.

### ***3.2 Pemerintahan Eks Karesidenan Kediri***

Karesidenan Kediri meliputi 4 kabupaten dan 2 kotamadya yaitu kabupaten Nganjuk, Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kotamadya Kediri dan Kotamadya Blitar. Ketika terjadi penyerangan yang pertama oleh Belanda 21 Juli 1947 Karesidenan Kediri tetap utuh, karena

Belanda hanya sampai di daerah Malang dan di Kabupaten Mojokerto. Pengaruh pertempuran pertama boleh dikatakan tidak terasa oleh rakyat, kecuali tambahan beban menerima pengungsi yang jumlahnya cukup besar.

Pemerintahan sipil berjalan normal. Peralihan administrasi dari Jepang ke republik termasuk pengisian jabatan-jabatan yang ditinggalkan Jepang tidak menimbulkan permasalahan yang serius, karena sejak zaman Jepang itu sebenarnya pimpinan kantor, jawatan dan instansi termasuk pimpinan perkebunan berangsur-angsur sudah dipegang oleh bangsa Indonesia sendiri. Struktur pemerintahan pun tidak banyak berubah. Sama dengan yang terjadi di lain-lain daerah, hanya terjadi perubahan nama wilayahnya seperti *Syuu* menjadi Karesidenan, *Ken* menjadi kabupaten, *syuchokan* dan *kencho* menjadi residen dan bupati dan lain sebagainya.

Untuk menjalankan roda pemerintahan maka di Kediri dibentuk KNI yang beranggotakan sekitar 50 orang yang merupakan perwakilan dari partai-partai yang ada. Dari 50 anggota KNI Daerah tersebut ditetapkan sebagai Badan Eksekutif adalah Wasis dari PNI, M. Tahir Huseini dari partai Murba, A.W. Suyoso dari Masyumi dan Abdul Karim dari Masyumi. Ketua KNI Daerah adalah Dr. Joko Salamun. KNI daerah Kediri selama keberadaannya telah mengadakan sidang sebanyak 3 kali yakni 2 kali bertempat di Kabupaten Kediri, 1 kali di Kotamadya Kediri. Dengan lahirnya UU No. 22 tahun 1948 tentang pemerintahan daerah, KNID ini kemudian diubah menjadi DPRD.

Adapun susunan pemerintahan Kediri waktu itu adalah

Residen	:	Suwondo Ranuwijoyo,
Sekretaris Residen	:	Muntoro Atmosentono
Bupati Blitar	:	Dharmadi
Bupati Tulungagung	:	Djanuismedi
Bupati Kediri	:	Mustajab
Walikota Kediri	:	Suprpto
Walikota Blitar	:	Suparno

Disamping Badan Eksekutif residen dibantu oleh Dewan Pertahanan Daerah yang anggota-anggotanya adalah :

Ketua : Residen  
Anggota : Komandan Resimen Brigade S,  
Letkol R. Surachmad  
Sekretaris : R. Abdurachman

Adapun tugas dari DPD adalah memberikan nasehat kepada residen dalam urusan-urusan yang menyangkut pertahanan sedangkan badan eksekutif lebih merupakan penasehat dibidang urusan pemerintahan sipil.

Setelah aman dari serangan Belanda pada periode Perang Kemerdekaan pertama, maka pada Perang Kemerdekaan kedua, Karesidenan Kediri mendapat serangan dari Belanda. Tanggal 25 Desember 1948 kota Kediri mendapat serangan dari Belanda. Bom-bom yang dijatuhkan tidaklah terlalu besar sehingga kerusakan yang ditimbulkan tidaklah terlalu banyak menelan korban. Namun karena serangan yang terus menerus sehingga perlu diadakan evakuasi terhadap aset-aset pemerintahan yang penting.

Pemerintahan karesidenan di tempatkan di desa Tawingan di wilayah Kecamatan Mojo kira-kira 20 km dari pusat Kota Kediri. Kecamatan Mojo terletak di seberang barat Sungai Brantas dan berlatar belakang Kecamatan Besuki di lereng gunung Wilis. Yang ikut memantau di Desa Tawingan antara lain :

Residen : Suwondo,  
Sekretaris Residen : Muntoro Atmosentono,  
Kepala Penilik  
Kepolisian Jawa Timur  
Komisaris : Suprpto,  
Sekretaris Dewan Pertahanan Daerah : R. Abdurachman.

Pemerintahan militer berpindah-pindah dan terakhir di tempatkan di Desa Pamongan termasuk wilayah Kecamatan Sendang. Jika Tawingan masih berada di kaki Gunung Wilis,

Desa Pamongan sudah berada di lereng gunung dengan ketinggian 700 – 800 m. berada di desa Pamongan antara lain: Komando Resimen/Komando Brigade, Letkol R. Surachmad, Kepala Staf Resimen May. Yono Sewoyo, Staf Brigade Kapt. Kartijo. Walikota Kediri mengambil kedudukan di Desa Pojok, Kecamatan Gampengrejo, sedang Sekretaris Kotapraja Dwijo Sumarto bertempat di Desa Gayam.

Pembagian tugas antara residen dan para anggota badan eksekutif adalah bahwa semua anggota Badan Eksekutif melaksanakan tugas penghubung yang menghubungkan residen dengan para bupati dengan pejabat instansi pusat. Khusus anggota Badan Eksekutif M. Tahir Husaini bersama-sama pengurus Taman Siswanya dipindahkan ke Kecamatan Plosoklaten, di Desa Panjer. Dalam perjalanan selama memimpin pemerintahan kemudian yang terjadi adalah bupati Blitar mengambil kedudukan di daerah Lodoyo, Boyolangu, bupati Tulungagung mengambil tempat di daerah Durenan, bupati Nganjuk mengambil tempat di Jaticapur, Kecamatan Prambon, bupati Kediri mengambil kedudukan di Desa Ngetrep, Kecamatan Mojo.

Masalah yang pelik dihadapi dalam pemerintahan di Karesidenan Kediri pada waktu itu adalah keberadaan para pegawai sipil. Mereka dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama tidak enak yaitu apakah ikut bergerilya ke gunung-gunung dengan jaminan tidak bisa mengurus keluarganya sehingga jaminan hidup keluarganya menjadi terganggu, atau tetap tinggal di kota dengan resiko harus menghadapi Belanda, sehingga harus bekerjasama dengan Belanda. Akibatnya adalah sebagai pengkhianat bangsa. Namun akibat pilihan yang tidak enak bagi yang tinggal di kota maka ada sebagian pegawai yang harus bekerjasama dengan Belanda ada yang tetap tidak mau kompromi dengan Belanda dan resikonya mereka ditangkap Belanda.

Selama pendudukan Belanda di Kediri begitu besar hambatan yang dihadapi penduduk. Pada bulan-bulan Januari 1949 adalah bulan-bulan paceklik. Padi baru saja selesai ditanam, jagung di tanah datar maupun di lereng-lereng gunung baru berbunga

sehingga tidak bisa dimakan. Dalam satu bulan para pengungsi dan pegawai yang berjuang makan dari persediaan yang mereka bawa dari kota. Anggota pasukan makan dari persediaan depot-depot logistik yang mampu mereka amankan, sementara rakyat sendiri masih terkesima dengan datangnya situasi yang mendadak.

Dalam suasana yang demikian itu residen, sebagai kepala pemerintahan sipil, merasa berkewajiban untuk mencari pemecahan yang sebaik-baiknya. Tidak ada alternatif lain yang bisa ditempuh kecuali berusaha mengumpulkan dana untuk biaya perang ini dengan menarik bantuan dari rakyat. Apa bentuk yang tepat yang kira-kira tidak dirasa oleh rakyat sebagai pemberi beban yang berat.

Bentuk sumbangan yang ditetapkan kemudian adalah berupa pajak yang besarnya 1/5 dari dari hasil tanamannya. Inilah jalan pemecahan yang ditempuh oleh pemerintah pada waktu itu untuk mencukupi kebutuhan perjuangan. Pelaksanaan oleh para kepala desa dengan pengawasan dari camat/wedana. Hasil dari pemungutan pajak ini seluruhnya diperuntukkan bagi kelangsungan perjuangan melawan Belanda.

Formasi pasukan selama perang kemerdekaan di Karesidenan Kediri pada waktu itu adalah :

1. Batalion Mujayin ( Yon 20) yang disebut Yon Branjangan berkedudukan di daerah Blitar
2. Batalion Sobirin (Yon 21) yang berkedudukan di daerah Tulungagung yang kemudian disebut Yon Mliwis,
3. Batalion Surachman (Yon 27) yang kemudian disebut Yon Sriti berkedudukan di daerah Kediri bagian utara
4. Batalion H. Machmud (Yon 24) yang kemudian disebut Yon Glatik berkedudukan di daerah Kandat dan Ngadiluwih
5. Batalion Sunandar (Yon 19) yang disebut Yon Merak berkedudukan di daerah Pare – Ngantang

6. Batalion Yuwono (Yon 23) yang disebut Yon Sikantar berkedudukan di daerah Kediri Selatan.

Disamping kesatuan-kesatuan tersebut terdapat kompi-kompi yang berdiri sendiri yaitu: Kompi Macan Gembong di daerah Kalangbret, Kompi Macan Kumbang di daerah Tulungagung, Kompi Macan Sruni di Trenggalek, Kompi Macan Tutul di daerah Ngunut, Kompi Macan Rembah di daerah Kampak, Kompi Macan Putih berkedudukan di daerah Ngantang. Selain itu ada pasukan Brigade XVII TRIP yang beroperasi di daerah Blitar, Trenggalek, perbatasan Kabupaten Kediri – Kabupaten Jombang. Disamping itu ada ribuan pegawai yang ikut bergerilya dan harus dipelihara kondisi ketahanan mentalnya agar tidak kembali ke kota dan bekerjasama dengan Belanda. Selama bergerilya pasukan berpindah-pindah dari tempat/sektor yang satu ke tempat yang lain. Sehingga tugas dari penguasa teritorial yang ada seperti camat dan kepala desa untuk menyediakan tempat berteduh dan mensuplai makanan bagi para pengungsi dan pejabat pemerintahan yang ada. Untuk itu biasanya direkrut tenaga sularelawan dari desa-desa untuk membantu kepala desa menyediakan tempat dan membuat tempat berteduh.

### ***3.3 Pemerintahan Eks Karesidenan Malang***

Sebagian besar wilayah eks Karesidenan Malang merupakan daerah pegunungan atau dataran tinggi. Bagian yang rendah di sebelah utara berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Di sebelah utara berbatasan dengan wilayah Karesidenan Kediri. Di sebelah barat menjulang Gunung Kawi, Gunung Welirang dan lain-lain, sedang di sebelah timur berbatasan dengan Karesidenan Surabaya.

Eks Karesidenan Malang terbagi atas 4 kabupaten yaitu: Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Lumajang. Karena wilayah eks Karesidenan Malang banyak *onderneming* atau perkebunan-perkebunan dan pabrik-pabrik gula, dimana dulu banyak orang

Belanda bekerja, maka sejak jaman penjajahan di wilayah Karesidenan Malang sudah terbentuk 3 kotamadya yaitu daerah Kotamadya Malang, Kotamadya Pasuruan, Kotamadya Probolinggo.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan sebelum Perang Kemerdekaan pertama 21 Juli 1947, susunan pemerintahan sipil di wilayah Karesidenan Malang adalah sebagai berikut:

Residen Malang	: RAA, SAM kemudian diganti oleh Mr. Sunarko,
Bupati Malang	: Sudono
Bupati Pasuruan	: Sujono
Bupati Probolinggo	: Sudarmo
Bupati Lumajang	: Abubakar Kartowinoto
Walikota Malang	: Sarjono
Walikota Pasuruan	: Astamun
Walikota Probolinggo	: Gatot

Selama Perang Kemerdekaan aktivitas pemerintahan Karesidenan Malang adalah mengamankan uang ORI. Dalam waktu singkat tanggal 30 Juli 1947 malam tanggal 1 Agustus 1947 atas perintah Gubernur Jawa Timur menyelenggarakan penyelamatan uang ORI yang ada dalam penguasaan Kantor Pemberesan Keuangan Malang di Turen dan masih jadi tanggungan percetakan negara di Kendalpayak (Malang Selatan) dari Turen ke Blitar. Uang ORI tersebut banyaknya 119 peti.

Selain itu mengusahakan, menampung adanya pegawai-pegawai pemerintah Republik Indonesia dari berbagai jawatan yang tiap harinya mengalir/mengungsi dari daerah pendudukan. Mengusahakan agar pegawai-pegawai pemerintah Republik Indonesia dari pelbagai jawatan yang tiap harinya mengalir/mengungsi dari daerah pendudukan. Dan diusahakan roda pemerintahan tetap berjalan di daerah perbatasan dan daerah pengungsian.

Serbuan Belanda kedua ke wilayah Republik Indonesia di Karesidenan Malang datangnya tidak terduga, terjadi pada malam hari menjelang pagi hari tanggal 19 Desember 1948. Maka dalam suasana ketakutan itu pejabat-pejabat pemerintahan yang dapat meloloskan diri hanya beberapa orang saja yaitu: dari pemerintahan Karesidenan Malang adalah Abubakar Kartowinoto (residen) Japan Notobudoyo, wedono dpp, Arwoko yang waktu itu menjabat sekretaris Residen RI Malang, dari pemerintah kotapraja Malang adalah Sarjono (walikota) dan Sudiono (sekretaris walikota). Dari pemerintah Kabupaten Malang adalah Sukartono bupati Malang, Subandi patih Malang, Moh. Salamet sekretaris kabupaten, Mahmud Notonondito, wedono Singosari, Hasan Wiryokusumo asisten wedono Kalipare, Suwaryo wedono Turen, Ismaun Danusastro asisten wedono Lawang, Achadun asisten wedono Dampit, dari pemerintahan Lumajang adalah Sastrodikoro seorang bupati Lumajang, Subiyakto patih Lumajang, Machmud sekretaris kabupaten.

Bersama-sama dengan rombongan polisi karesidenan yang dipimpin oleh Onggoparnoto, kepala polisi Karesidenan Malang, rombongan pemerintahan sipil Karesidenan Malang yang dipimpin Residen Abubakar Kartowinoto pada pagi hari tanggal 19 Desember 1948 hijrah dan meninggalkan Turen ibukota Karesidenan Malang setelah serbuan Belanda pada agresi pertama menuju pertama-tama ke Pedukuhan Sumber Gentong untuk kemudian berturut-turut menuju ke beberapa pedukuhan atau desa yang tidak/belum didatangi tentara Belanda yaitu Desa Sidomulyo, Desa Kedung Banteng, Desa Sindurejo ke Pedukuhan Tumpakrejo.

Rombongan pemerintahan sipil Kabupaten Malang yang dipimpin oleh bupati Malang mundur ke daerah Kalipare, sedangkan rombongan pemerintahan sipil Kabupaten Lumajang menggabungkan diri dengan pimpinan pemerintahan militer Karesidenan Malang yang berada di Semeru Selatan sebagai perwakilan pemerintahan Karesidenan RI Malang. Sejak menyingkir lagi dari daerah pendudukan karena Perang Kemerdekaan II, pemerintah Karesidenan Malang dengan alat-

alat yang ada padanya berusaha: memutar roda pemerintahan RI, menjamin memenuhi sejauh mungkin kebutuhan hidup para pegawai Republik Indonesia dari pelbagai jawatan sipil yang masih ada dalam naungan yang banyaknya daerah Malang selatan/Kawi selatan lebih kurang 1.100 orang pegawai, dengan keluarganya menjadi 5000 orang. Di daerah Semeru selatan lebih kurang 450 orang dengan keluarganya berjumlah 1800 orang. Jaminan kebutuhan hidup sejauh mungkin dilakukan dengan menggali sumber pendapatan seperti menarik sumbangan wajib berupa hasil padi dan jagung guna dapat memberikan jaminan berupa natura kepada pegawai-pegawai Republik Indonesia dengan keluarganya. Mengadakan pungutan pajak yang diperkenankan yang dirasa tidak memberatkan masyarakat. Mencetak secara darurat serta mengeluarkan prames-prames negara berdasarkan peraturan pemerintah RI tanggal 30 Januari 1949 No. I dan No. II. Selain itu pemerintahan sipil berusaha membantu kebutuhan pasukan yang sedang berperang.

### ***3.4 Pemerintahan Eks Karesidenan Madiun***

Wilayah Karesidenan Madiun di tengah-tengah adalah dataran rendah. Di sekelilingnya terletak gunung-gunung dan pegunungan yaitu di sebelah utara Pegunungan Kendeng, di sebelah barat Gunung Lawu, di sebelah selatan Pegunungan Gamping selatan dan di sebelah timur Gunung Wilis. Dataran rendah wilayah Karesidenan Madiun yang dibelah oleh Sungai Madiun atau Bengawan Gentong merupakan daerah pertanian yang cukup subur. Tidak mengherankan jika sejak zaman Belanda di wilayah ini Belanda mendirikan pabrik-pabrik gula yang jumlahnya 6 buah yaitu pabrik gula Sudhono terletak di Kabupaten Ngawi, pabrik gula Rejoagung terletak di Kabupaten Madiun, pabrik gula Rejosari terletak di Kabupaten Magetan, pabrik gula Kanigoro terletak di Kabupaten Madiun, pabrik gula Pagotan terletak di Kabupaten Madiun dan pabrik gula Glodok terletak di Kabupaten Magetan.

Sesuai dengan strategi dan tujuan penyerbuan Belanda ke daerah Madiun, terutama untuk menguasai sumber-sumber

kekuatan ekonomi, maka sasaran penguasaan Belanda ketika menyerbu wilayah Karesidenan Madiun adalah enam pabrik gula tersebut. Di sekitar pabrik-pabrik gula inilah Belanda bertahan dan mengkonsolidasikan kekuasaannya. Belanda membangun pabrik-pabrik yang ditinggalkan oleh Republik Indonesia dan berusaha juga menanam tebu, seolah keberadaannya kembali di daerah ini sudah merupakan kenyataan yang tidak perlu dipermasalahkan lagi. Jangan dilupakan peran para *onderneming wachten*nya yang dibentuk Belanda. Jika keberadaan topografi wilayah Karesidenan Madiun yang seperti itu disatu pihak menguntungkan Belanda, dilain pihak juga menguntungkan republik. Daerah yang datar menguntungkan Belanda karena dengan itu Belanda dengan cepat dapat meluaskan daerah kekuasaannya. Sebaliknya daerah yang bergunung-gunung dan berbukit-bukit memberikan tempat bertahan yang sangat baik bagi pemerintahan maupun bagi pasukan republik. Dari bukit dan pegunungan pasukan republik melancarkan serangan ke pos-pos Belanda dan melaksanakan taktik *hit and run*. Residen Pamudji selama delapan bulan bertahan di daerah sekitar Danau Ngebel dan kekuatan Brigade Mobil Polisi Mohammad Yassin tak bergeser kedudukannya di daerah persil Kandangan, di Kempo, Serang sampai saat penghentian tembak menembak Juli 1949.

Meskipun dalam instruksi Dewan Pertahanan Pusat kepada Dewan Pertahanan Daerah Karesidenan Madiun hanya dijelaskan petunjuk mengenai pembentukan kantor-kantor dalam pengungsian dengan formasi darurat dan mengenai sikap para pegawai yang tidak termasuk *nood* formasi tanpa diberi petunjuk secara rinci mengenai cara pegawai dalam *nood* formasi terutama mengenai pimpinannya, namun intuitif disadari oleh yang bersangkutan mengenai peran dan sikap yang harus dimiliki dan dikembangkan secara baik.

Perkembangan pemerintahan sipil di Madiun diawali ketika Residen Susanto Tirtoprodjo menjabat sebagai residen Madiun hanya selama satu tahun karena ketika kabinet Syahrir II, dia diangkat sebagai menteri kehakiman sejak tanggal 12 Oktober 1946. Panggilan utama dalam bidang administrasi pemerintah

daerah di Karesidenan Madiun letaknya dalam bidang kemampuan untuk memberikan sumbangan pemikiran kedalam aspek-aspek kemerdekaan kedalam penafsiran dan penerapan undang-undang dan peraturan-peraturan pemerintah lainnya, warisan dari zaman kolonial yang masih diberlakukan terus oleh karena belum ada peraturan penggantinya dengan tetap berpegang kepada asas sebagai negara hukum. Kriteria demokratisasi dalam melaksanakan pemerintahan daerah ditentukan di pusat oleh KNIP dengan dibentuknya pada tingkat karesidenan. Pada tingkat karesidenan sedangkan di tingkat kabupaten dan kotamadya belum diadakan.

Pemerintahan daerah di Karesidenan Madiun dapat melestarikan diri dengan lancar dan mantap terutama disebabkan oleh tetap terpeliharanya dan berfungsinya personel yang profesional lagi dengan semangat dan dedikasi kerja yang tinggi antara lain dengan didukung oleh tetap dan utuh berfungsinya korps pamong praja yang prestatif, berdisiplin disamping prestasi kerja yang terpelihara dengan mantap dan mapan oleh seluruh jajaran dan peringkat aparat pemerintah daerah, dengan sendirinya memancarkan kewibawaan pemerintah kepada seluruh lapisan masyarakat.

Setelah Mr. Susanto Tirtoprodjo, residen Madiun adalah Mr. Residen Samadikun. Sebelum diangkat sebagai residen Madiun, Samadikun menjabat sebagai wakil residen di Kediri, mendampingi Pratalykrama. Untuk menjalankan pemerintahan hal-hal yang dilakukan Samadikun antara lain memindahkan Sidharto, bupati Ngawi yang diangkat sebagai wakil residen Madiun, mendampingi Samadikun.

Pada saat pecahnya pemberontakan PKI Madiun dalam bulan September 1948, Walikota Madiun, Sumarsono sedang menjalani cuti sakit selama 5 bulan, sehingga Supardilah dengan diikuti oleh beberapa orang dengan memanggul senjata kelihatan mendatangi rumah Sidharto dengan menyodorkan sebuah dokumen yang memuat penyerahan kekuasaan pemerintah Karesidenan Madiun kepada kaum pemberontak. Pada waktu itu

Sidharto jabatan pokoknya adalah wakil residen dan yang pada saat itu menjabat sebagai pejabat residen Madiun karena Samadikun, residen Madiun tidak ditempat yaitu bersama-sama dengan Murjani, gubernur Jawa Timur sedang menghadap Presiden Republik Indonesia Sukarno untuk melaporkan mengenai ancaman gangguan keamanan yang oleh PKI akan dilancarkan di Karesidenan Madiun. Karena tidak ada alternatif lain maka terpaksa Sidharto menandatangani dokumen tersebut. Sasaran berikutnya adalah Sumarsono walikota Madiun. Namun dengan cerdas Sumarsono menyatakan bahwa pada saat itu, ia dalam keadaan cuti sedang jabatan walikota Madiun sepenuhnya berada di tangan Supardi, sehingga Sumarsono lolos dari upaya pemaksaan menandatangani dokumen maut tersebut. Rombongan Supardi kemudian mendatangi Kusnendar, bupati Madiun. Namun Kusnendar pada waktu itu pergi ke rumah orang tuanya, sehingga pendopo kabupaten kosong.

Sikap pamong praja dalam gerilya berusaha tidak menjelmakan dirinya sebagai birokrat yang hanya mampu untuk berprestasi dengan hanya tersedianya petunjuk pelaksanaannya. Bahkan dalam kemungkinan tiadanya atasan. Pamong praja dalam bergerilya harus mampu bersikap bertindak dan memberikan pimpinan kepada bawahannya secara swa mandiri dengan bekal bisikan nurani yang murni dan hasil olahan pikiran yang sehat, demi suksesnya dan berhasilnya perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dimana saja, kapan saja dan menghadapi masalah apa saja, masyarakat melihat dalam dirinya lambang keluhuran dan pengejawantahan negara dan pemerintahan Republik Indonesia dan harus cepat tanggap sehingga tidak didahului oleh fakta-fakta kenyataan.

Didalam bergerilya pamong praja adalah bapak rakyat, yang mampu menyejukkan hati rakyat, memelihara kerukunan dan kesusahan rakyat di dalam menghadapi dan menanggung segala akibat dari ulah perang gerilya. Ia harus mampu memelihara semangat perjuangan seluruh rakyat dengan mengobarkan semangat tidak mau menyerah kepada musuh meskipun bujukan atau rayuan Belanda yang bagaimanapun juga. Ia harus menjadi

faktor penengah dan perantara antara rakyat dengan pasukan-pasukan gerilya yang sedang beroperasi di daerahnya, maupun dengan penguasa teritorial yang memangku wilayah tempat tinggal rakyat. Ketulusan dan keikhlasan rakyat yang bersedia dan mampu memenuhi segala kebutuhan tentara yang bergerilya di daerahnya merupakan sumber dan daya kekuatan pertama dan utama untuk memenangkan perang gerilya.

### **3.5 Pemerintah Eks Karesidenan Bojonegoro**

Wilayah Karesidenan Bojonegoro di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Blora (Jawa Tengah), di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gresik dan di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Madiun, Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Jombang dengan sekat Gunung Kendeng, Gunung Gajah dan Gunung Pandan. Tanahnya sebagian tandus berkapur. Daerah yang subur terletak di dataran rendah sepanjang Bengawan Solo.

Wilayah Karesidenan Bojonegoro meliputi 3 kabupaten yaitu Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Tuban.

Residen Bojonegoro setelah proklamasi	:	RMTA Suryo
Bupati Bojonegoro	:	RT Utomo
Bupati Lamongan	:	Cokrosudirjo
Bupati Tuban	:	Sudirman

Ketika pecah Perang Kemerdekaan II, susunan pemerintahan Karesidenan Bojonegoro telah berubah menjadi

Residen Bojonegoro	:	Mr. Tandiono Manu
Bupati Bojonegoro	:	M. Surowiyono
Bupati Lamongan	:	Sukaji
Bupati Tuban	:	KHR. Musta'in

Berita proklamasi di daerah Bojonegoro ditanggapi oleh rakyat Bojonegoro dengan antusias. Barisan pemuda dan KNI Daerah segera dibentuk. Pengambilalihan kekuasaan dari tangan

penguasa Jepang berjalan cepat dan tanpa insiden. Namun disamping adanya tindakan-tindakan yang heroik tersebut, ada sikap dari penguasa pemerintahan sipil yang kurang tepat dalam menghadapi aksi-aksi rakyat khususnya dalam hal pengibarisan sang merah putih. Timbul kemudian tindakan-tindakan radikal berupa usul pemecatan residen dan sesudah residen diganti terjadi penggantian kepala-kepala daerah dari bupati sampai wedana dan asisten wedana di seluruh wilayah Karesidenan Bojonegoro. Penggantian kepala-kepala daerah tersebut dilandasi dengan sebuah maklumat pimpinan pemerintahan kekomisarian Bojonegoro No. 1 tertanggal Desember 1945.

Setelah RMTA Suryo residen Bojonegoro dijabat oleh Mr. Hindro Martono yang dilakukan oleh residen baru diantaranya adalah mengubah sebutan jabatan-jabatan dengan komisaris-komisaris baik untuk urusan jawatan maupun instansi pusat. Sudah barang tentu langkah yang demikian ini tidak disetujui oleh pemerintah pusat. Tindakan penertiban pun diadakan, namun untuk bisa kembali kepada susunan atau struktur pemerintahan yang lama cukup memakan waktu dan residen Hendro Martono kemudian diganti oleh Residen Mr. Tandiono Manu pada bulan Pebruari 1947. Bersamaan dengan itu diangkat pula bupati baru bagi Kabupaten Bojonegoro yakni Suriwiyono, sebagai pengganti bupati Sudiman.

Bulan Maret 1947 diadakan acara serah terima jabatan yang dihadiri wakil-wakil partai dan organisasi-organisasi serta jawatan-jawatan. Residen baru segera mengambil tindakan-tindakan. Dengan melihat kapasitas masing-masing maka segera diadakan perubahan-perubahan yang tujuannya untuk memaksimalkan kinerja pemerintahan. Salah satunya instruksi dari pemerintah pusat agar gedung-gedung yang sudah sekian lama ditempati oleh organisasi atau badan dikembalikan seperti keadaan semula yaitu kepada jawatan dinas pemerintahan yang bersangkutan. Hal ini agak menemui kesukaran sebab badan-badan perjuangan yang sudah sekian lama menempati gedung-gedung itu tidak dapat begitu saja dipindahkan sebelum memperoleh tempat gantinya. Baru pada bulan Januari 1948

kantor karesidenan dapat menempati gedungnya kembali, sedang bupati masih belum mendapatkan gedungnya kembali.

### ***3.6 Pemerintahan Eks Karesidenan Besuki***

*Oost Hoek* suatu istilah yang digunakan di zaman pemerintahan kolonial Belanda untuk menyebut ujung timur pulau Jawa, merupakan salah satu wilayah karesidenan di Jawa Timur dengan nama Karesidenan Besuki dengan ibukotanya waktu itu Bondowoso. Ujung timur Pulau Jawa ini merupakan daerah makmur yang sejak dulu merupakan gudang berasnya Jawa Timur yang mampu memberikan sumbangan berasnya kepada propinsi lain di luar Jawa Timur termasuk Yogyakarta pada zaman revolusi fisik itu menjadi ibukota negara Republik Indonesia. Dengan beras dari ujung Pulau Jawa ini pemerintah Syahrir waktu itu mampu menembus blokade Belanda dengan menjual beras ke India dan dari India, Republik Indonesia memperoleh pembayaran berupa sejumlah besar alat perlengkapan Angkatan Perang Republik Indonesia. Hal ini terkenal dengan diplomasi beras.

Adapun jalannya diplomasi beras tersebut adalah sebagai berikut, ketika itu terdengar kabar bahwa India terancam kelaparan. Indonesia yang mempunyai beras terpanggil untuk melakukan tindakan kemanusiaan dengan menawarkan memberikan beras kepada India, Indonesia yang memerlukan sekali bahan pakaian akan menerima tekstil dari India sebagai bahan tukarnya. Maka pada tanggal 12 April 1946 Perdana Menteri Syahrir menyampaikan tawaran beras sebanyak 500.000 ton. Pada tanggal 18 Mei datang wakil India KL Punjabi di Indonesia. Pada tanggal 20 Agustus dilakukan penyerahan padi yang pertama dan diangkut dengan kapal *Empire Favour* dan kapal ini berlabuh di Cochin Port India dengan muatan 6000 ton. Melihat kejadian ini Belanda sangat marah, dan berusaha menggagalkan usaha ini dengan mengadakan sabotase antara lain dengan menembaki gudang-gudang beras yang ada di Banyuwangi.

Di samping beras, daerah ini menghasilkan beberapa produk perkebunan yang terutama adalah tembakau, kopi, coklat, dan serat nanas. Tembakau Besuki merupakan komoditi ekspor ke Eropa Barat, khususnya Belanda dan setelah Pengakuan Kedaulatan ditambah dengan Jerman. Karena posisinya yang demikian itu, daerah Karesidenan Besuki khususnya Jember dan Banyuwangi merupakan sumber devisa, baik bagi Belanda sebelum Perang Dunia II maupun bagi Republik Indonesia setelah kemerdekaan.

Karena itu ketika Belanda berusaha menduduki Indonesia kembali melalui Perang Kemerdekaan I, tindakan pertamanya adalah menduduki daerah yang subur ini. Karena disamping memperkecil wilayah Yogyakarta, Belanda juga berusaha menguasai sektor ekonomi terutama perkebunan yaitu kopi, tembakau, coklat. Setelah Belanda menguasai perkebunan-perkebunan itu maka dibentuklah pasukan penjaga kebun yang dinamakan OW (*Onderneming Wachter*).

### *3.7 Sistem Pemerintahan Di Besuki pada Masa Kolonial*

Pada awal abad XIV sistem pemerintahan kolonial mempertahankan struktur feodal masyarakat Indonesia, dimana kedudukan bupati sangat strategis. Sistem pemerintahan yang berlaku yaitu sistem pemerintahan tak langsung dimana bupati memegang peranan penting dan rangkap. Bupati tetap mempunyai kedudukan sebagai penguasa puncak di daerahnya disamping berperan sebagai perantara antara penguasa kolonial dan rakyat. Hal itu berarti suatu kedudukan yang bertambah kuat didalam kekuasaan pemerintahannya.

Di Karesidenan Besuki pemerintah kolonial Belanda menerapkan sistem ekonomi politiknya sejak tahun 1830 dilandasi ideologi konservatif dan pemerintahan secara tidak langsung. Bupati Besuki, Probolinggo dan Banyuwangi sebagai penguasa daerah mempunyai anggapan sebagai pemilik tanah-tanah di daerahnya, maka mereka merasa berhak untuk menarik pelbagai pungutan di daerahnya baik berupa hasil bumi maupun jasa-jasa

lainnya. Sikap dan tindakan bupati-bupati itu juga ditiru oleh penguasa-penguasa di daerahnya, sehingga beban yang dipikul oleh rakyat terasa berat. Pemerintah kolonial yang berada di atas pemerintah pribumi tidak mencampuri urusan pemerintah para bupati, para penguasa daerah digunakan sebagai saluran untuk memperoleh hasil produksi pertanian buat komoditi ekspor. Para bupati mendapat kekuasaan besar di daerahnya, hal ini dapat dilihat dari banyaknya pengiring yang mengikutinya ketika bupati mengadakan kunjungan ke wilayah kekuasaannya. Pengiring yang banyak ini selain untuk menunjukkan kewibawaan bupati juga untuk menakut-nakuti rakyat agar segera menyerahkan pajaknya.

Semenjak sistem Tanam Paksa dijalankan para pejabat pribumi dilipatgandakan jumlahnya untuk mengurus pelaksanaan sistem Tanam Paksa. Dalam laporan Residen Cornets de Groot tahun 1836 jumlah pejabat pribumi *afdeling* Besuki dan Penarukan hanya 39 orang, kemudian menurut laporan residen tahun 1842 jumlah pejabat pribumi *afdeling* Besuki bertambah menjadi 124 orang. Bila dilihat dari perubahan itu ada penambahan pejabat baru sebanyak 85 orang dan pejabat-pejabat baru itu adalah lebih banyak sebagai pejabat rendahan yang dipekerjakan pada desa-desa dan distrik saja. Dengan penambahan pejabat baru sebanyak 85 orang, dan pejabat-pejabat baru itu adalah lebih banyak sebagai pejabat rendahan yang dipekerjakan pada desa-desa dan distrik saja. Dengan penambahan pejabat-pejabat rendahan untuk mengurus kegiatan produksi pertanian ini berarti kekuasaan bupati bertambah pula. Sedangkan di pihak pemerintah kolonial Belanda administrasinya berkembang pula, jumlah pegawai bangsa Eropa bertambah banyak. Para pegawai ini berpencar kedudukannya di daerah pedalaman. Sehingga ada pengawasan oleh residen, asisten residen dan *kontrolier* terhadap tingkah laku bupati beserta bawahannya. Meskipun demikian struktur feodal masih kokoh dengan menempatkan kepala desa tetap di bawah pamong praja, sehingga mereka tidak dapat bertindak dan berhubungan langsung dengan atasannya. Penggunaan organisasi desa untuk meningkatkan produksi pertanian eksport berarti memperkuat pula ikatan-ikatan yang ada di desa, sehingga rakyat tidak lagi memiliki kebebasan pribadi.

Karesidenan Besuki wilayahnya dibagi menjadi tiga *regenschap* yaitu *regenschap* Probolinggo, Besuki dan Banyuwangi. *Regenschap* Probolinggo dibagi menjadi tiga *afdeling* yaitu *afdeling* Probolinggo, *afdeling* Keraksaan dan Lumajang. *Regenschap* Besuki dibagi menjadi tiga *afdeling* yaitu *afdeling* Besuki, *afdeling* Penarukan dan *afdeling* Bondowoso. *Regenschap* Banyuwangi hanya dibagi menjadi dua distrik yaitu distrik Bayuwangi dan Rogojampi. Masing-masing *afdeling* dibagi menjadi beberapa distrik dan tiap-tiap distrik dibagi menjadi desa.

Sistem pemerintahan di Karesidenan Besuki dalam dua puluh tahun terjadi perubahan-perubahan. Di *regenschap* Probolinggo terjadi ketidakpuasan pada tahun 1839, dimana bupati Probolinggo Kyai Tumenggung Wiryo Wiyono akhirnya diberhentikan pada tahun 1840 karena protes rakyat Madura yang merendharkannya karena berasal dari keturunan rakyat biasa. Kedudukan Bupati Probolinggo itu kemudian digantikan oleh bupati Besuki Raden Adipati Aryo Prawiro Adiningrat, bangsawan asal Madura, sedangkan putranya Raden Tumenggung Aryo Kusumo Adinoto diangkat sebagai pejabat pemerintah Besuki. Pemerintah Belanda khawatir kalau mereka itu akan memperbesar pengaruh keluarga bangsawan Madura di Jawa Bagian Timur maka pada tahun 1842, bupati Probolinggo dikembalikan ke Besuki dan pejabat bupati Besuki dipindahkan ke Trenggalek. Jabatan bupati Probolinggo kemudian diisi oleh bupati Surabaya Raden Tumenggung Panji Cokronegoro. Pada bulan Oktober 1842 Bupati Besuki, Raden Adipati Aryo Adiningrat oleh pemerintah Belanda diberi gelar pangeran. Pada tahun 1843 ia meninggal dan yang menjadi bupati Besuki adalah anaknya yang pertama dengan memakai gelar Raden Aryo Prawiro Adiningrat.

Pada tahun 1849 *afdeling* Penarukan dan Bondowoso ditingkatkan statusnya menjadi *regenschap*. Terhadap perubahan ini timbul rasa tidak puas dari rakyat maupun bupati Besuki. Hal ini disebabkan karena wilayah Penarukan dan Bondowoso luasnya meliputi dua pertiga wilayah *regenschap* Besuki,

disamping itu penduduknya mayoritas dari Madura yang mempunyai hubungan dengan bupati Besuki yang asalnyanya juga dari Madura. Namun perubahan ini tetap dijalankan oleh Belanda sebagai usaha untuk memecah kekuatan rakyat dan untuk efektifitas kontrol terhadap pribumi.

### ***3.8 Susunan Pemerintah di Besuki Setelah Negara Republik Indonesia Berdiri.***

Susunan pemerintahan di Besuki setelah kemerdekaan adalah sebagai berikut: Residen Besuki: Suryadi dengan dibantu beberapa bupati yaitu bupati Jember Sudarman, Bupati Banyuwangi Usman, Bupati Situbondo RA. Sudibyo Kusumo/RP ACH. Saleh Kusumowinoto, dan Bupati Bondowoso R. Sutandoko/RT Saleh Suryodiningprojo. Setelah 21 Juli 1947 susunan pemerintahan mengalami perubahan. Hal ini disebabkan banyak pejabat RI terpaksa meninggalkan posnya, mundur ke desa-desa atau pindah tempat tinggal di daerah Surabaya atau daerah yang dirasa cukup aman. Namun karena tekanan-tekanan Belanda yang tidak henti-hentinya terhadap kelompok pejabat ini, pada akhirnya banyak dari pejabat tersebut yang lalu menjadi pegawai pemerintahan (recomba) yang dibentuk oleh tentara pendudukan Belanda. Bupati Jember Sudarman ditawan Belanda di Sidoarjo, sedang patihnya R. Sunarto Hadiwijoyo ditawan di Lawang. R. Sunarto kemudian diangkat menjadi Residen Madura setelah Perang Kemerdekaan kedua. Akibat tekanan Belanda hanya sedikit saja pejabat yang mencoba terus bertahan sebagai pegawai pemerintah Republik Indonesia di daerah-daerah perbatasan, pegunungan, dan pedesaan dengan perlindungan senjata yang sangat terbatas. Salah satu diantaranya adalah Wedana Tamanan Kabupaten Bondowoso yang bernama R. Badrus Sapari. Badrus Sapari dapat bertahan di wilayah Tamanan sebagai wedana karena sikap menduannya yaitu sebagai wedana RI dan juga sebagai wedana Belanda.

Didaerah Kawedanan Tamanan inilah para pemimpin perlawanan rakyat bertahan dengan pasukannya masing-masing.

Wedana Badrus bertindak selaku penjamin keamanan sepanjang pasukan ini berada di daerah Tamanan. Adapun pasukan lainnya diantaranya adalah Letkol Tahirun sebagai komandan resimen, Mayor Magenda sebagai komandan batalion, Kapten Samsuri Jidut, komandan kompi, Inspektur II Cipto Yudodihardjo, Mayor Chandra Hasan dan Dokter Cokro Suryadi.

Karena Belanda percaya pada wedono Badrus ini, maka pada suatu saat, Badrus diberi 10 pucuk senapan untuk kelengkapan pelaksanaan tugas memelihara keamanan. Kedok wedono Badrus lama-lama diketahui oleh Belanda. Karena ternyata 10 pucuk senjata tersebut oleh Badrus diserahkan kepada pejuang-pejuang. Badrus bersama-sama temannya para pejuang akhirnya meninggalkan daerah Tamanan untuk membuat markas yang baru di lereng Gunung Argopura. Daerah yang dipilih adalah daerah yang sulit dicapai manusia dan letaknya pun di luar jalur perhubungan jalan antara Bondowoso dan Situbondo.

Keadaan gunung dirasakan semakin lama semakin sulit sampai pasukan tersebut harus meninggalkan daerah Bondowoso untuk hijrah ke Yogyakarta memenuhi perintah pemerintah pusat. Adapun keseluruhan pasukan yang diperhitungkan hijrah dari daerah Karesidenan Besuki adalah pasukan dari Brigade III/ Damarwulan di bawah pimpinan Letkol Muhammad Surdji dengan batalyon-batalyonnya :

1. Batalyon Magenda dari kantong-kantong gerilya di daerah Bondowoso
2. Batalyon Rivai dari kantong-kantong gerilya di daerah Banyuwangi
3. Batalyon Safiudin dari kantong-kantong gerilya di daerah Jember
4. Batalyon Darsan Iru, daerah gerilya di sekitar Panarukan/ Situbondo, sedangkan laskar setempat yang ikut hijrah antara lain Batalyon Mujahidin dan batalyon Santoso dari kantong gerilya di daerah Lumajang. Brigade Damarwulan

diberangkatkan dari tempat-tempat berkumpul yang telah ditentukan kemudian melalui Bangil menuju Blitar, Kepanjen, Kediri Nggurah dan lain-lain.

Badrus Sapari tetap tinggal di hutan bersama-sama 10 orang pengawalnya, termasuk dua orang wanita. Wedono Badrus akhirnya tertangkap Belanda dan dimasukkan penjara di Bondowoso. Tidak lama kemudian isterinya juga tertangkap dan dimasukkan ke penjara juga. Menjelang pengakuan kedaulatan Badrus Sapari berhasil melepaskan diri dari penjara, lalu pulang ke Banyuwangi. Di Banyuwangi Badrus di daulat rakyat untuk menjadi bupati Banyuwangi, tetapi akhirnya Badrus ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai bupati Bondowoso (1949- 1950).

### ***3.9 Pemerintahan Eks Karesidenan Madura***

Setelah kesatuan-kesatuan dibubarkan maka anggota anggota Heiho, Peta, Keibo, dan Seinendan kembali ke kampung halaman masing-masing menjadi rakyat biasa. Akan tetapi sebenarnya mereka sudah memiliki militansi dan disiplin militer telah ditempatkan bagi dirinya. Oleh karena itu setelah mereka mendengar Proklamasi Kemerdekaan bangsa Indonesia didengarkan ke seluruh pelosok nusantara mereka berkumpul menyusun kekuatan kembali.

Pada tanggal 5 Oktober 1945, pemerintah pusat di Jakarta melalui KNIP mengeluarkan instruksi kepada Komite Nasional Daerah tentang pembentukan Tentara Keamanan Rakyat. Setelah menerima instruksi tersebut maka KNI Daerah untuk jelasnya mengutus dua orang stafnya yaitu Amin Jakfar dari Kabupaten Pamekasan dan M. Hanaf ketua BKR Kecamatan Pamekasan. Setelah mereka menerima bantuan 2 buah *watermantel*, sedangkan BKR Surabaya menerima 10 pucuk senjata senapan dan sebuah truk. Pada tanggal 17 Oktober 1945, KNI daerah Madura mengadakan rapat untuk membicarakan instruksi KNI Pusat yang dibawa oleh 2 orang utusan tersebut. Dalam rapat itu telah diambil keputusan untuk mencalonkan R. Anjasmoroyudo bekas kapten barisan sebagai komandan

resimen Madura Barat Sampang dan Bangkalan dan R. Chandra Hasan bekas Tjudancho Madura dai I daidan sebagai komandan resimen Madura Timur (Pamekasan dan Sumenep). Setelah mendapat persetujuan KNIP Pusat masing-masing diangkat dengan pangkat letnan kolonel dan Letkol Chandra Hasan ditugaskan untuk membentuk TKR resimen 35 sedang Letnan Kolonel Asmoroyudo diperintahkan membentuk TKR resimen 36. Akhirnya mengingat kondisi yang sulit maka 2 resimen digabung menjadi satu dengan komandannya adalah Letkol. R. Chandra Hasan.

Selama Perang Agresi pertama, Belanda mengadakan aksi blokade politik dan ekonomi untuk Pulau Madura. Setiap kapal atau perahu yang menuju ke pantai Madura dicegat dan dirampas isinya. Tetapi masih ada saja perahu yang lolos dari cegatan. Pada tanggal 5 Oktober 1946 pemerintah Madura mengirimkan delegasi ke Jawa untuk mencari sumbangan bahan makanan dan akan melaporkan kepada atasannya mengenai situasi dan kondisi di Madura. Namun mereka ditembaki oleh Belanda di perairan Probolinggo. Setelah itu Belanda mengadakan serangan besar-besaran ke Madura sehingga Sumenep dan Pamekasan menjadi ajang pertempuran yang hebat diantara kedua belah pihak.

Pusat pemerintahan Republik Indonesia hijrah ke Pagantenan. Di desa Klampar, Morsamber, Plakpak terjadi pertempuran-pertempuran sengit. Setelah serangan ini maka Madura secara berangsur-angsur dikuasai Belanda. Sehingga pemerintahan sipil di Madura relatif tidak berjalan lancar. Selain itu kondisi bahan makanan juga sangat memprihatinkan sehingga perlu mencari sumbangan bahan makanan ke Pulau Jawa. Namun selalu kena patroli Belanda.

Dalam kurun waktu pra Perang Kemerdekaan yang ke II diketahui bahwa dalam struktur organisasi kantor gubernur Jawa Timur di Blitar diketemukan bagian yang disebut perwakilan pemerintah Karesidenan Madura sedang yang ditunjuk untuk mengepalai adalah Mohammad Noer. Adapun sebab mengapa Moh. Noer waktu itu diangkat sebagai pejabat yang memimpin

perwakilan pemerintahan Karesidenan Madura pada kantor Gubernur Jawa Timur di Blitar karena Mohammad Noer sendiri dituturkan sebagai berikut: waktu Belanda di pantai Madura sudah menduduki ibu kota Kabupaten Bangkalan Moh. Noer menjabat asisten wedana Arosbaya. Setelah berhasil meloloskan diri dari penangkapan Belanda dan setelah untuk beberapa waktu berhasil kucing-kucingan dengan pasukan-pasukan Belanda yang mengejanya, kelompok Mohammad Noer pada malam harinya berhasil meloloskan diri dari Pulau Madura dengan menggunakan sebuah perahu layar ke arah barat sejauh mungkin menghindari kapal-kapal perang Belanda yang berkeliaran sepanjang Laut Jawa.

Atas dasar pengalaman itu maka perahu yang ditumpangi oleh rombongan Mohammad Noer memilih rute pelayaran yang lebih ke tengah laut. Ketika keesokan harinya tampak laut sepi dari patroli-patroli Belanda, dengan telah kelihatannya pantai Pulau Jawa, maka diputuskan untuk mengadakan pendaratan pada pantai tersebut. Baru kemudian setelah berhasil mendarat dengan selamat, diketahui mereka sudah berada di Kabupaten Tuban bahkan di sebelah kota Tuban. Sesudah itu rombongan mulai mengadakan perjalanan darat ke arah timur Sedayu, dimana kebanyakan dari para gerilyawan Madura mendarat.

Setelah itu Mohammad Noer bersama-sama dengan rombongannya mengadakan perjalanan darat melalui daerah-daerah yang dikuasai Republik menuju Blitar dengan maksud dan tujuan untuk melaporkan kepada gubernur Jawa Timur. Setelah melaporkan diri, oleh Gubernur Dr. Murjani, Mohammad Noer ditugaskan untuk memimpin bagian khusus pada kantor gubernur yang disebut perwakilan pemerintah Karesidenan Madura. Akan tetapi berhubung dengan keterbatasan akomodasi di kota Blitar, bagian yang dipimpin olehnya diperbolehkan untuk berdomisili di kota Kediri.

## BAB IV

### BESUKI SELAMA MASA REVOLUSI

#### *4.1 Belanda Menyerang Besuki*

Pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melancarkan aksi Agresi Militernya yang pertama. Di medan Jawa timur, tentara darat Belanda bergerak menerobos garis demarkasi di Porong sekitar subuh. Stasiun kereta api kota Bangil mendapat serangan udara. Sebelum tengah hari kota Bangil dan Pasuruan berhasil direbut secara sepihak oleh Belanda dan mendadak membatalkan persetujuan Linggarjati. Dari sini pasukan Belanda bergerak ke Lawang dan Probolinggo. Lawang dijepit oleh pasukan Belanda dari arah Bangil dan Pasuruan. Tetapi disini tentara RI sudah siaga. Gerak maju tentara Belanda yang dipelopori pasukan lapis baja sehari-hari bertahan di daerah Pandaan, di daerah Plered, Wonorejo. Dibawah komando Markas Pertahanan Surabaya di Pandaan, Yon Abdullah, Pasukan "O" ALRI pasukan laskar-laskar yang belum sempat dilebur dalam TNI, mengadakan perlawanan yang hebat, sehingga beberapa pasukan Belanda berhasil dilumpuhkan.

Dibagian lain marinir Belanda pada sebuah subuh tanggal 21 Juli 1947 memulai agresinya pertama dengan mendaratkan pasukan amfibinya di Pasir Putih dan Pantai Banyuwangi, di

ujung timur Jawa Timur. Dari Pasir Putih ini pasukan dipecah menjadi dua yaitu ke arah barat merebut Besuki, Paiton, Kraksaan, Probolinggo bertemu dengan pasukan Belanda yang bergerak dari daerah Pasuruan. Dari Probolinggo gerakan ke selatan merebut Leces dan bermalam di Malasan. Sebagian pasukannya bergerak merebut Panarukan, Situbondo terus ke Bondowoso, bertemu dengan pasukan Marinir yang mendarat di pantai Banyuwangi di Kalisat. Sebagian pasukan langsung masuk daerah Arjasa dan setelah bertemu dengan pasukan yang bergerak dari Kalisat, bersama-sama menyerbu kota Jember dari arah timur laut. Dari pantai Banyuwangi pasukan Belanda bergerak ke arah barat. Setiba di Gempol pasukan dipecah menjadi dua yaitu ke Kalisat untuk bertemu dengan pasukan yang bergerak ke Bondowoso dan yang satunya menempuh daerah Pegunungan Betiri mencapai Mayang dan Wonogiri, menyerbu kota Jember dari arah tenggara.

Kota Jember berhasil direbut Belanda pada tanggal 21 Juli 1947 sore hari. Tanggal 22 Juli 1947 dari Malasan merebut Klakah terus ke Lumajang. Pasirian di kaki Gunung Semeru direbut pada siang hari. Dari Klakah sebagian bergerak ke arah timur, merebut Jatiroto bertemu dengan pasukan yang bergerak dari kota Jember ke arah barat di Rambipuji. Dari sinilah Belanda merebut Balung dan Puger. Kota-kota Karesidenan Besuki di bagian timur Karesidenan Malang berhasil direbut dalam waktu 2 hari.

Serangan Belanda membuat porak-poranda pemerintahan RI yang baru berumur 2 tahun di Karesidenan Besuki. Dengan tercapainya persetujuan Renville antara Republik Indonesia dengan Belanda, maka tentara dan pemerintah Republik di daerah tersebut harus hijrah ke tanah republik melewati suatu batas wilayah yang dikuasai oleh pasukan RI maupun pasukan Belanda yang dinamakan garis Van Mook.

Maka berangkatlah serombongan pejabat-pejabat pemerintahan sipil/pamong praja sebanyak 200 orang dari daerah Kabupaten Jember menuju Blitar pusat pemerintahan RI di Jawa Timur pada waktu itu. Para pejabat tersebut adalah :

M. Widigdo asisten wedono, Gumuk Mas, asisten wedono Umbul Sari Sutrisno, Asisten Wedono Puger Sumarno dan Wedono Rencong R. Sukamtomo alias Pak Gardo. Rombongan ini berjalan barhari-hari. Untuk keperluan makan dengan meminta bantuan penduduk dari desa-desa yang dilewatinya. Sampai di Blitar untuk selama 7 hari 7 malam, rombongan ditampung di rumah Ibu Wardoyo, kakak Bung Karno, di Jalan Gebang. Di kediaman Ibu Wardoyo ini dilakukan konsolidasi pemerintahan Karesidenan Besuki dengan susunan : pejabat residen adalah Puguh seorang pejabat dari Instansi Pengairan, sekretaris residen adalah Subijantoro, eks sekretaris Kabupaten Panarukan di Situbondo, pejabat bupati Jember adalah Sukamto eks wedono Kencong dan bagian keuangan karesidenan ditetapkan Sujatmo.

Mengingat kondisi yang sangat genting maka kantor Karesidenan Besuki ditetapkan di Blitar. Di Blitar itu Sutrisno, eks asisten wedana Umbulsari memperoleh pengangkatan sebagai asisten wedono Nglekok. Ketika terjadi pemberontakan PKI Muso, Sutrisno dibunuh PKI, karena ketika dimintai menyediakan beras untuk pasukan PKI ia tidak mau mengusahakannya.

Untuk menyediakan pembiayaan kegiatan pemerintahan selama Perang Kemerdekaan II, berdasarkan konperensi di Desa Jugo, Kecamatan Kesamben antara asisten wedana, Jawatan Penerangan, Pertanian dan guru-guru, maka dikeluarkan rokok (pajak tembakau) yang diberi cap "17". Pemerintah darurat Karesidenan Besuki ini kemudian Wingate, memasuki daerah Besuki kembali, dibawah perlindungan pasukan Brigade II. Ketika Wingate itu M. Widigdo mendapat pangkat tituler sebagai letnan II.

#### ***4.2 Penyempurnaan Organisasi Kemiliteran di Jawa Timur***

Setelah kemerdekaan terbentuklah badan-badan perjuangan bersenjata sebagai organisasi kelaskaran. Pemerintah sendiri menciptakan suatu badan bersenjata sebagai organisasi kelaskaran yang militan. Dan badan itu diatur oleh Kementerian Keamanan Pertahanan dengan nama Badan Keamanan Rakyat

(BKR). BKR ini timbul sebagai kristalisasi dari pemuda-pemuda pejuang baik yang telah tergabung dalam berbagai badan perjuangan bersenjata, pemuda-pemuda militan yang menyadari akan panggilan zamannya, maupun dari pemuda-pemuda bekas kesatuan-kesatuan buatan Jepang yang tergabung dalam kesatuan Peta, Heiho, Djibakutai dan lain-lain.

Sementara itu dalam rapat Panitia Kemerdekaan Indonesia telah dibentuk rencana yang konkrit mengenai Badan Keamanan Rakyat yang sekaligus pula membentuk Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP). Dalam keputusannya yang tersebut dalam bab III disebutkan :di masa sekarang ini akan sangatlah perlu mengadakan satu badan yang dapat menjamin kepada rakyat yang menderita akibat peperangan pertolongan dan bantuan. Pertolongan bantuan ini hendaknya secara lahir batin. Maka pada tanggal 20 Agustus 1945 berdirilah Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP) dan Badan Keamanan Rakyat (BKR). Tiga hari setelah kejadian ini PJM Presiden Sukarno mengucapkan pidato tentang BKR ini melalui radio antara lain disebutkan bahwa pembentukan BKR untuk membantu menjaga keamanan. Kita adakan Badan Keamanan Rakyat ini untuk mendapat keamanan yang seteguh-teguhnya. Setelah pidato Sukarno ini maka di daerah-daerah mulai dibentuk BKR-BKR daerah hampir di seluruh Indonesia.

Di daerah Karesidenan Besuki, sebelum terbentuk BKR di daerah ini terlebih dahulu dibentuk Barisan Angkatan Muda yang disingkat AM. Republik Indonesia. Hal ini disebabkan bahwa berita tentang diadakannya suatu Badan Keamanan Rakyat sangat lambat dan baru didengar dari para pejuang yang datang dari kantor lainnya.

Pembentukan BKR di daerah ini tidak banyak berbeda dengan daerah-daerah lainnya, hanya perkembangannya agak berlainan. Di daerah ini BKR dibentuk menurut susunan sebagai berikut: BKR resimen berada di Bondowoso dipimpin oleh Tahirudin Tjokroatmodjo, BKR resimen II berada di Jember dipimpin oleh Soewito. Batalyon-batalyon yang tergabung dalam BKR Resimen I ialah Batalyon Musjarfan di daerah

Situbondo, Batalyon Soedirman di daerah Kotok/Ardjoso, Batalyon Soekotjo di daerah Pradjekan, Batalyon Magenda di daerah Bondowoso. Batalyon yang tergabung dalam BKR Resimen II ialah Batalyon Mochamad Sroedji di daerah Jember, Batalyon Soerodjo di daerah Jember, Batalyon Istiklah di daerah Banyuwangi, Batalyon Soepono Djiwa/otaruno di daerah Banyuwangi, Kompi Meriam Sjafiuddin di daerah Jember.

Jumlah dari anggota BKR Resimen I sejumlah 2500 orang. Salah satu dari BKR Resimen I ada yang mengalami perubahan pimpinan ialah BKR Bondowoso yang semula di bawah pimpinan Mayor Rosadi diganti oleh Mayor Magenda. Kecuali BKR tersebut diatas masih ada lagi BKR yang tidak menggabungkan diri dalam BKR resimen I dan II tetapi berdiri sendiri dan bergerak atas dasar kemauan rakyat yang besar dan diorganisir sedemikian rupa sehingga merupakan suatu kesatuan tempur yang sanggup mempertahankan tanah air dari incaran penjajah, maka terdapatlah BKR sebagai berikut:

1. BKR Karesidenan Bondowoso dipimpin oleh Abdul Kahar
2. BKR Kawedanan Situbondo dipimpin oleh Ismail Bakri
3. BKR Kawedanan Asembagus dipimpin oleh Untung
4. BKR Kawedanan Maesan dipimpin oleh Yusuf
5. BKR Kawedanan Pradjekan dipimpin oleh Soekotjo
6. BKR Kawedanan Tamanan dipimpin.....
7. BKR Kawedanan Bentjuluk dipimpin oleh I Sastrodihardjo
8. BKR Kawedanan Rogodjampi dipimpin oleh....
9. BKR Kawedanan Kalisat dipimpin oleh Sutopo
10. BKR Kawedanan Tanggul dipimpin oleh Saleh Hasan
11. BKR Kawedanan Kentjong dipimpin oleh Sardi Arief
12. BKR Kawedanan Ambulu dipimpin oleh Soekandio
13. BKR Kawedanan Rambipudji dipimpin oleh Soebandi.

Kesemuanya itu bergerak serentak untuk tujuan yang sama yang mempertahankan negara Republik Indonesia. Maka segeralah disempurnakan lagi organisasi BKR ini sehingga pada akhirnya tergabung menjadi satu dengan bentuk-bentuk

organisasi yang telah ditentukan oleh pemerintah. Dengan diresmikannya BKR di daerah Republik Indonesia berdasarkan keputusan sidang panitia kemerdekaan Indonesia maka dengan adanya unsur kemiliteran ini sebenarnya sudah lengkap unsur Republik Indonesia yang diproklamasikan kemerdekaannya.

### ***4.3 Pendudukan daerah-daerah penting di Wilayah Besuki***

#### ***Pendudukan Pasuruan***

Sebelum Belanda menyerang Pasuruan lebih dahulu dilakukan serangan udara berkali-kali. Dua hari berikutnya Belanda mengadakan serangan besar-besaran pada tanggal 21 Juli 1947. Serangan ini datangnya dari jurusan Bangil dan serangannya dilakukan melalui dua poros. Kolone pertama datang dari jurusan Bangil melalui Desa Gerongan Kecamatan Kraton dengan berjalan kaki dan masuk Pasuruan. Kolone kedua dengan segala peralatannya antara lain dengan tank-tank stuartnya dan bren-bren cariernya langsung melalui jalan besar dengan beberapa truk pasukan infanterinya dari batalyon Juliana.

Pada waktu datangnya clash I ini lebih dahulu telah diadakan penyerangan dari darat oleh pasukan-pasukan infanteri sekitar 1 batalyon dan ternyata mendapat perlawanan hebat dari pihak Indonesia. Hanya pada waktu tanggal 21 Juli 1947 tidak ada perlawanan berhubung menurut perhitungan taktis sangat merugikan.

Sementara itu keadaan tentara RI waktu terjadinya penyerangan dari Belanda maka pasukan RI yang berada di Pasuruan sejumlah dua kompi. Satu kompi dari batalyon Pasuruan di bawah pimpinan Kapten Dulatip dan satu kompi dari batalyon 34 di bawah pimpinan Kapten Benu Saibuddin. Pertahanan terdempannya hanya terdiri dari satu peleton batalyon 34 dibawah pimpinan Letnan Soebandi yang ditempatkan di Desa Pendungan.

Sementara itu pendudukan Kota Probolinggo dilakukan hampir bersamaan dengan pendudukan daerah Pasuruan.

Sebelum terjadinya serangan oleh Belanda, maka sepanjang pantai Kota Probolinggo telah dibuatkan perbenteng untuk mempertahankan Kota Probolinggo dari serangan musuh. Kemudian komando daerah dibentuk dibawah Mayor Abdul Syarif sebagai komandannya. Pasukan RI Macan Kumbang dengan Komandan Mayor Abdul Syarif, resimen II dipimpin oleh Lettu I Soenardi, ALRI Pangkalan IX dipimpin oleh Mayor Ra'is dan laskar Hisbullah dipimpin oleh Sidik Mihadji.

Serangan Belanda dimulai dengan mengadakan serangan darat dan laut. Dari selat Madura dan mendarat di Pasir Putih terus menyerang Kraksaan pada jam 16.15, kemudian terus menuju Probolinggo. Kekuatan disini terdiri dari 147 buah kendaraan dan dipelopori oleh tank-tank amphibinya yang sesampainya di Desa Dringo, pasukan dipecah menjadi dua kolone. Kolone yang pertama ke jurusan selatan untuk langsung menyerang dan menduduki Lumajang, sedang yang satu bagian lagi kejurusan utara melalui jalan dekat pantai menuju Probolinggo sedang sisanya masuk Kota Probolinggo.

### ***Pendudukan Kota Lumajang***

Pendudukan Kota Lumajang dimulai Belanda dengan mengadakan serangan dari arah utara dan timur pada tanggal 22 Juli 1947. Pada waktu itu batalyon yang berada di Lumajang baru tiba dari Sidoarjo, sehingga pasukan sebenarnya dalam keadaan istirahat. Tiap-tiap kompi hanya ditinggalkan satu regu. Anggota batalyon sedang terpencar, karena keadaan perang maka oleh komandan batalyon diperintahkan untuk menyusun pasukan masing-masing di daerahnya. Daerah tersebut adalah daerah Sukodono yang dipimpin oleh Kapten Jasir, daerah Josowilangun dipimpin oleh Letnan Soekartijo dan daerah Pasirian dipimpin oleh Letnan Soewandi. Karena kedudukan terjepit maka pasukan RI mengadakan kontak dengan daerah Malang. Setelah sebulan berlalu baru kekuatan batalyon dirasa pulih kembali dan pasukan kembali berkedudukan di Desa Pasru/Kecamatan Sendowo yang dipimpin oleh Kapten Djoko Soeparto. Dengan demikian maka pasukan di Lumajang berjumlah 4 Kie ditambah 1 peleton

tersendiri di daerah Klakah dibawah pimpinan Letnan Kamari Sampurno dan bagian kesehatan. Sedangkan batalyon bertempat di Babakan Kecamatan Sukodono. Karena kedudukan yang masih lemah maka pasukan yang dipimpin oleh Kapten Jasir bertindak sangat defensif untuk menghadang agar pasukan Belanda tidak berhasil masuk ke daerah Semeru Selatan, karena ditempat ini merupakan markas staf divisi dan rumah sakit tentara. Sehingga daerah ini harus dijaga ketat. Sedangkan pasukan yang dipimpin oleh Letnan Soekartijo berkedudukan di Josowilangun. Pasukan ini mengadakan penghadangan di daerah Josowilangun dan hasilnya sangat memuaskan.

Kapten Soewandha yang memimpin Kie III berkedudukan di daerah Klakah bersama dengan pasukan yang dipimpin oleh Letnan Kamari Sampurno dengan dibantu oleh Kepala Jawatan Penjara Wonoredjo (Soemarno). Pasukan ini berhasil menggerakkan pasukan rakyat sehingga rakyat dan tentara bergabung menjadi satu untuk mempertahankan daerah Klakah.

Kie IV yang sifatnya mempertahankan dan Kie Slamet Wardojo mengadakan serangan-serangan. Hasilnya dapat membakar persil Sumberredjo, Kebon Delli, Danuredjo, Sumberowo dan jembatan Gladakgerak, Kaliglidik dan Pronodjiwo. Kie Slamet Wardojo dapat memimpin gerakan pertahanan rakyat di daerah. Tiap-tiap malam seluruh Kie mengadakan serangan-serangan ke markas-markas Belanda yang pada waktu itu terdiri dari satu batalyon angkatan laut. Dari pihak Belanda pada pertempuran itu banyak terjadi korban, baik serangan yang dilakukan pada malam hari maupun pada siang hari. Oleh karena itu Belanda merubah siasat perangnya dengan membentuk pasukan Cakra, AP (*Algemene Politie*) dan dibantu oleh OW (*onderneming Wacht*) di beberapa perkebunan, sehingga pihak tentara berhadapan dengan musuh yang sangat kejam. Banyak rumah-rumah rakyat yang dibakar atau digarong.

Seksi Genie yang dipimpin oleh Letnan I Soekarto berkedudukan di Jatiroto dimana beliau gugur sewaktu mengadakan pertempuran. Sehingga jenazahnya dimakamkan di Jatiroto. Pasukan Polisi P 3 yang dipimpin oleh Kom. Djowari

mengadakan pertempuran di Tumpeng (Kecamatan Tempeh) dengan kekuatan 1 (satu) peleton hingga beliau gugur juga bersama-sama dengan 22 anggota pasukannya.

Kie Mudjahidin (Hisbullah) yang dipimpin oleh Kyai Iljas berkedudukan di daerah Sindoro terdiri dari satu peleton. Seksi Panjiwulung dipimpin oleh Soewarno dibantu oleh Nadim dengan tugas memberantas mata-mata musuh. Sisa-sisa polisi mempertahankan di daerah Dorogowok, Kecamatan Kunir dengan dipimpin oleh Kom Tai. Mereka ditawan Belanda hingga meninggal.

Waktu Belanda akan menerobos ke daerah Semeru Selatan di daerah Pronojiwo, Kecamatan Candipuro dipertahankan mati-matian oleh pasukan TRI dengan kekuatan 2 Kie yang terdiri Kie Kapten Soewondo dan Kie Nailoen Hanam sehingga Belanda tidak dapat menerobos ke Semeru Selatan dan terpaksa kembali ke Lumajang dengan kerugian personel dan materiil yang tidak sedikit.

#### ***4.4 Kisah Jatuhnya Kota-kota Panarukan, Situbondo, Besuki, Bondowoso, Jember dan Banyuwangi.***

Pagi-pagi benar dengan secara mendadak tanggal 21 Juli 1947 mulai pukul 06.00 Pantai Pasir putih di daerah Kabupaten Panarukan, Situbondo dan juga Pantai Banyuwangi sebelah utara dan selatan oleh Belanda dihujani tembakan meriam dan mortier dan senjata berat lainnya. Di samping itu pesawat terbang Belanda dengan terbang rendah memuntahkan tembakan-tembakan mitraliur dan alat perang lainnya. Pantai Pasirputih dipertahankan oleh kesatuan TLRI dari pangkalan X/A di bawah pimpinan Mayor Warouw dengan kekuatan persenjataannya yang amat sederhana dan dalam keadaan tidak lengkap.

Tembakan-tembakan meriam (kanon) dari pihak Belanda yang dahsyat dan bantuan pasukan lainnya di sekitar pertiga jalan Desa Waringin Anom yang menuju ke Desa Kendit dan Panarukan. Didalam pertempuran tersebut, Letnan Soenardi (komandan Kompi dari Batalyon V/40/VII dari Batalyon Risadi gugur bersama

beberapa orang anak buahnya . Selain itu pasukan dari ALRI serta kelaskaran lainnya ikut gugur. Namun pihak Belanda pun tak luput dari kerugian. Beberapa orang pasukan mereka tewas dalam pertempuran tersebut. Akhirnya sekali lagi karena didukung dengan peralatan perang yang berlebihan, Angkatan Perang Belanda dapat mematahkan perlawanan di tempat tersebut, dan terus bergerak menuju Kota Situbondo. Pasukan-pasukan TRI/ALRI dan laskar rakyat lainnya bersama-sama mundur dari jalan-jalan raya dan untuk selanjutnya mengatur rencananya untuk mengadakan aksi gerilya.

Tanggal 21 Juli 1947 itu juga sekitar pukul 14.00 pasukan tentara Belanda dapat memasuki Kota Situbondo. Belanda mempergunakan gerakan *Blitzkrieg*. Pasukan tentara Belanda yang bergerak dari Pasir Putih menuju Besuki itu terus ke Probolinggo, dihadapi oleh seksi Pak Samaoen di pertigaan jalan Buduhan yang menghubungkan ke jurusan Bondowoso dan Besuki. Pertempuran berlangsung beberapa saat dan oleh sebab Belanda lebih unggul dalam soal persenjataan dan peralatan lainnya, tank dan panser berjumlah sekitar 75 buah maka seksi Samaoen ini tidak dapat membendunginya. Akhirnya ia mengundurkan diri mengganti dengan siasat gerilya. Belanda terus bergerak ke utara yaitu daerah Besuki pada tanggal 21 Juli 1947 pada kira-kira pukul 16.00. Dengan demikian Kota Situbondo berhasil diduduki oleh Belanda, setelah itu Belanda melanjutkan perjalanannya menuju Kota Bondowoso.

Sehubungan dengan arah pasukan Belanda ke Bondowoso ini maka ada kesempatan ini digunakan oleh pasukan Risadi untuk menyusun kekuatan. Batalyon Risadi berusaha mengatur pertahanan ke arah jurusan Asembagus dan di sekitar Kota Situbondo untuk mengadakan serangan-serangan terhadap kedudukan pos Belanda yang ada di sekitar Kota Situbondo.

Guna menahan majunya tentara Belanda ke Bondowoso tersebut, kesatuan Batalyon Magenda yang mempunyai tugas utama dari Batalyon Syarifuddin (Garuda Putih) memperbantukan 1 kompi yaitu Kompi Soetojo, kepada Batalyon

Magenda. Pasukan ini di tempatkan di Klabang, Pradjekan, guna menghambat gerakan pasukan Belanda. Sehingga terjadi pertempuran di sekitar jembatan sebelah utara dan di sekitar Kota Pradjekan dan Klabang antara pasukan Belanda dan anggota-anggota pasukan dari Batalyon Magenda, Kompi Soetojo dan juga dari Mobil Brigade Polisi dan kelaskaran-kelaskaran. Tetapi gerakan *Blitzkrieg*, Belanda yang dimekanisir itu sukar ditahan dengan alat-alat senjata yang sudah usang yang digunakan oleh pasukan Batalyon Magenda dan kesatuan lainnya yang hanya bersenjatakan bambu runcing dan senjata tajam saja. sehingga pasukan-pasukan dari batalyon Magenda dan dari Kompi Soetojo serta lainnya mengundurkan diri dari pertempuran-pertempuran di jalan besar. Belanda terus menuju ke Bondowoso. Karena kekuatan yang ada pada TLRI tidak sepadan dengan kekuatan Belanda, maka diambil keputusan oleh TLRI untuk melakukan siasat mundur dulu, tidak mempertahankan Pasir Putih secara frontal karena yang demikian itu tidak mungkin lagi tetapi harus melakukan siasat gerilya terhadap Belanda.

Belanda yang setelah berhasil mengadakan pendaratan di Pantai Pasir Putih secara besar-besaran, gerakan tentara Belanda dipecah menjadi dua yaitu yang sebagian terus bergerak ke arah Kota Panarukan dan Situbondo dan yang sebagian lagi bergerak ke arah Kota Besuki dan terus ke Probolinggo.

Batalyon Rosadi dengan menggerakkan kompi-kompinya antara lain Kompi Soenardi, Kompi Mochnan/Oetomo, Kompi Karsono mengadakan perlawanan pengadangan atas gerakan tentara Belanda tersebut, baik yang akan menuju Panarukan dan Situbondo maupun yang menuju Besuki, dengan menempatkan pasukan-pasukan pengadangannya di sekitar pertiga jalan Kota Panarukan yang menuju ke Besuki dan Situbondo bersama-sama pasukan TLRI, yang berada di Waringinanom di sekitar pertiga jalan desa Kendit yang menuju ke Pasir Putih, Panarukan dan Kendit bersama-sama pasukan TLRI yang mengundurkan diri dari Pasir Putih dan beberapa pasukan laskar rakyat.

Akibatnya terjadilah pertempuran hebat di Desa Tapong, Klatakan, Kendit antara seksi senjata berat Batalyon V/40/VII, Batalyon Rosadi dibawah pimpinan Letnan Muda Boeridin dengan pihak tentara Belanda pada tanggal 21 Juli 1947 pada jam 11.00 siang. Dalam pertempuran ini karena tentara Belanda dapat mematahkan perlawanan dari Seksi Boeridin ini dan mereka terus dapat bergerak menuju ke arah Situbondo. Dari seksi Boeridin korban sebanyak 5 orang, sedang dari pihak musuh tidak diketahui dengan pasti. Dengan demikian karena semakin terdesak maka saksi Boeridin mengubah siasat perang dari perlawanan frontal menjadi siasat gerilya.

Tanggal 21 Juli 1947 jam 10.00 pagi pasukan-pasukan yang bertahan di sekitar Penarukan juga terlibat dalam pertempuran dengan Belanda yang bergerak dari Pasir Putih menuju kota Panarukan juga terlibat pertempuran hebat. Perlawanan sengit diterapkan oleh kedua belah pihak. Namun akhirnya karena menang dalam peralatan perang, Belanda berhasil menduduki Kota Panarukan dan dari pihak kesatuan Batalyon Rosadi, dari ALRI dan laskar terpaksa mengundurkan diri dan bertahan di Desa Waringinanom. Dalam pertempuran ini korban jatuh di kedua belah pihak dan juga rakyat biasa terkena sasaran peluru dari senjata yang dimuntahkan pasukan Belanda secara membabi buta.

Pada jam 13.00 Belanda yang maju ke jurusan Situbondo dihadapi oleh Kompi Soenardi dan pasukan-pasukan dari ALRI dan pasukan lainnya. Bondowoso jatuh ke tangan Belanda pada tanggal 21 Juli 1947 petang hari. Setelah berhasil menguasai Bondowoso, Belanda bergerak ke arah Jember.

Kompi Soetojo dari Kelabang mengundurkan diri kembali ke daerah basisnya di daerah Jember dan selanjutnya bergerak ke daerah Jember Utara (Jimerto, Slawu, Serut, Pandi Badean). Kota Jember dipertahankan oleh Kompi Soetopo (kompi IV dan batalyon Garuda Putih) dan oleh anggota-anggota dari markas Resimen 40 serta lain-lain pasukan yang ada di daerah itu. Pertempuran terjadi di sekitar Bunder, Kota Maesan dan Ardjasa.

Di luar Kota Jember ke jurusan Bondowoso terjadi pertempuran dengan sengitnya antara kedua belah pihak dari Belanda melawan ALRI dan laskar-laskar bersenjata.

Seperti halnya gerakan Belanda yang menuju Kota Bondowoso tak dapat dibendung, demikian pula gerakan maju tentara Belanda yang menuju Kota Jember, walaupun telah dilakukan perlawanan-perlawanan yang tidak kurang sengitnya di beberapa tempat yang menghubungkan dengan Kota Jember, semuanya karena keunggulan dan berlebihan mengenai peralatan dan perlengkapan perangnya, maka tentara Belanda dapat mematahkan perlawanan di tempat-tempat tersebut dan dapat merebut Kota Jember jatuh ke tangan Belanda pada tanggal 22 Juli 1947 kurang lebih jam 16.00, tank-tank Belanda terus menerus mondar-mandir. Adapun pasukan-pasukan baik yang melakukan pertempuran penghadangan dan atau penghambatan gerakan majunya tentara Belanda yang menuju ke Kota Jember yang dilakukan oleh pasukan Kompi Soetopo (kompi IV Batalyon Sarifuddin) dari Batalyon Garuda Putih dan pasukan-pasukan dari lain-lain kesatuan serta Komando resimen 40 sendiri yang bersama-sama mempertahankan Kota Jember, setelah ternyata tidak dapat mempertahankan maka pasukan tersebut dengan menghindari pertempuran-pertempuran secara frontal mengundurkan diri ke luar dari jalanan besar dan yang dari dalam ke luar kampung ke luar sekeliling Kota Jember.

Komandan resimen 40/Damarwulan mengundurkan diri ke Desa Danuredjo dan sekitarnya ke daerah sebelah utara Kota Jember. Markas Batalyon Garuda Putih ke daerah selatan Kota Jember, demikian pula beberapa pasukan dari ALRI ke selatan kota.

#### *Jalannya Gerakan Belanda di Banyuwangi*

Pada tanggal 20 Juli 1947 sejak pagi hari tentara Belanda sudah berkali-kali hendak mengadakan pendaratan-pendaratan di Pantai Ketapang, Sukowidi, Meneng dan Pelabuhan Banyuwangi, tetapi percobaan-percobaan pendaratan itu

semuanya dapat digagalkan oleh kesatuan-kesatuan dari Batalyon Macan Putih, ABD Rifai dari ALRI pasukan 0032, ALRI Kesatuan 8 dan Pangkalan X serta dari beberapa kelaskaran yang tergabung dalam biro perjuangan yang bertugas dipertahanan tersebut.

Pada saat itu di daerah Kabupaten Banyuwangi terdapat dislokasi pasukan sebagai berikut :

- a. Batalyon Macan Putih (Abd Rifai) dengan kompi nya di Sukowidi, Ketapang, Sukoredjo dan Muncar
- b. TLRI dari kesatuan 8 (Letkol. Markadi yaitu TLRI untuk persiapan Sunda Kecil, dengan kompi nya di Sukowidi, Sukoredjo dan Sembulungan.
- c. ALRI dari kesatuan Jangkar Pangkalan X pimpinan Letkol Tamboto
- d. ALRI pasukan 0032 di bawah pimpinan Letda Soelaiman di Pelabuhan Banyuwangi
- e. Kompi Djanuari dari Batalyon Garuda Putih yang dipergunakan dalam Kota Banyuwangi serta Kompi Wijoto juga Batalyon Garuda Putih (Syarifuddin) yang juga diperbantukan pada Batalyon Macan Putih dan di tempatkan di Kalibaru, sedangkan pasukan-pasukan lainnya adalah kelaskaran-kelaskaran.

Jadi lihat dari jumlah pasukan-pasukan pada saat itu daerah Pantai Banyuwangi dipertahanan oleh banyak pasukan-pasukan yang berasal dari macam-macam kesatuan. Di Sembulungan ada sepucuk meriam houwitser dari 10,5 cm, secara permanen yang dijalankan oleh anggota-anggota dari Batalyon Abd Rifai dan mendapat bantuan dari ALRI, kesatuan 8 Letkol Markadi. Di Ketapang juga terdapat sepucuk meriam dari kaliber 4,5 cm yang dipakai sendiri oleh Mayor Abd. Rifai, Komandan Batalyon Macan Putih. Percobaan pendaratan dari tentara Belanda tanggal 20 Juli 1947 mempergunakan kurang lebih 25 kapal-kapal pendaratan tetapi dapat digagalkan oleh tentara RI. Sehingga tentara Belanda mundur setelah mengetahui kuatnya pertahanan

dari pasukan-pasukan kita ditempat itu. Dalam percobaannya itu Belanda mengalami banyak kerugian personelnya.

Tanggal 21 Juli 1947 mulai pukul 06.00 pagi, setelah sehari sebelumnya Belanda mengadakan pengintaian terhadap kekuatan tentara Republik Indonesia, maka tentara Belanda dengan secara besar-besaran mendaratkan kapal-kapal perangnya di Pantai Ketapang, di Pelabuhan Banyuwangi dan di Sukowidi. Melihat pendaratan secara besar-besaran ini maka ALRI segera mengadakan serangan dan akibatnya kedua belah pihak mengalami kerugian jiwa dan material.

Namun Belanda dengan kekuatan penuhnya berusaha dengan keras untuk menguasai dan merebut kota-kota di Banyuwangi. Abdul Rifai sebagai Komandan Batalyon Macan Putih akibat serangan yang dilakukan Belanda, mengakibatkan Abd. Rifai terluka tembakan. Sedangkan Seksi Soelaiman dari ALRI pasukan 0032 yang mempertahankan mati-matian Pelabuhan Banyuwangi gugur di medan pertempuran beserta seluruh anak buahnya lebih kurang 32 orang. Pertempuran di Sukowidi Kompi ALRI (Kompi Matsari) dan Kompi dari Batalyon Macan Putih mengadakan perlawanan yang cukup sengit. Akan tetapi oleh karena kekuatan tentara Belanda lebih lengkap dan mendapat bantuan dari angkatan udara, maka Belanda berhasil mendaratkan pasukannya di Pelabuhan Ketapang, dengan demikian Ketapang berhasil diduduki Belanda. Selanjutnya Belanda mengadakan penyerangan untuk menaklukkan Banyuwangi dan berusaha menjepit pasukan-pasukan yang mempertahankan Pelabuhan Banyuwangi. Jadi pasukan ALRI dari Seksi Soelaiman menghadapi musuh dari dua jurusan yaitu dari muka dan dari belakang, sehingga mengakibatkan hancurnya seksi tersebut. Pertahanan Sukowidi juga jebol dan Belanda terus bergerak maju ke pusat Kota Banyuwangi.

Perlawanan dalam Kota Banyuwangi amat sengit. Gerakan pasukan Belanda yang datang dari arah Ketapang, dari Pelabuhan Banyuwangi dan Sukowidi bergerak secara serentak menjepit pasukan Republik yang berada di kota. Sehingga ibaratnya

jatuhnya Kota Banyuwangi hanya tinggal menunggu waktu saja. Akibat gerak maju pasukan Belanda ini maka Sukorejo menjadi tempat bertemunya pasukan Belanda dan republik, sehingga terjadi pertempuran sengit di tempat ini. Kompi Januari dari Batalyon Garuda Putih yang disertai tugas mempertahankan Kota Banyuwangi berusaha keras mempertahankan Kota Banyuwangi. Setelah Kapten Januari tertawan Belanda, akhirnya Banyuwangi jatuh ke tangan Belanda pada tanggal 21 Juli 1947 pukul 12.00 siang. Dengan dikuasainya Banyuwangi maka hampir seluruh wilayah tapal kuda wilayah Jawa telah dikuasai Belanda. Daerah ujung timur wilayah pulau Jawa ini memang menjadi sasaran Belanda untuk segera dikuasai karena selain strategis juga daerah ini menjadi lumbung padinya wilayah Jawa Timur bahkan Pulau Jawa secara umum.

Setelah Banyuwangi dikuasai, Belanda dengan mempergunakan tank-tank raksasanya dan panser-pansernya terus maju mengadakan gerakan merebut seluruh Kota Banyuwangi, Genteng serta Benculuk. Majunya tentara Belanda ini tidak mampu lagi ditahan oleh pasukan Republik Indonesia yang pada waktu itu dipercayakan kepada pasukan yang berada di bawah resimen 40. Dengan demikian kota-kota tersebut jatuh pada tanggal 21 Juli 1947 pada petang hari. Setelah itu Belanda menduduki Rogojampi.

Dari Rogojampi ini pasukan Belanda dibagi menjadi tiga pasukan. Satu pasukan tetap tinggal di Rogojampi. Sedangkan pasukan lainnya bergerak untuk menduduki Kalibaru yang berhasil diduduki Belanda tanggal 22 Juli 1947. Untuk menyusun kekuatan, pasukan Belanda bermalam di Genteng. Setelah mendapat tambahan pasukan dari Benculuk, pasukan Belanda bergerak dari Genteng menuju Kalibaru. Wilayah Kalibaru pada waktu itu dibawah Komando Kompi Wijoto dari Batalyon Macan Putih. Pertempuran sengit terjadi antara Kompi Wijoto yang berjumlah relatif lebih kecil dengan persenjataan yang sangat minim melawan pasukan Belanda dengan persenjataan lebih lengkap dan canggih. Akhirnya dengan bermodalkan semangat juang saja ternyata tidak cukup, sehingga Kalibaru jatuh ke

tangan Belanda pada tanggal 22 Juli 1947 kurang lebih pukul 14.00. Dikuasainya Kalibaru oleh Belanda maka hampir dua pertiga wilayah Besuki telah dikuasai oleh Belanda.

Sementara itu pasukan Belanda yang datang dari Jember pada tanggal 23 Juli 1947, berusaha merebut Rambipuji, Balung dan Tanggul. Wilayah-wilayah tersebut berhasil diduduki Belanda pada hari itu juga. Dari Tanggul, Belanda melanjutkan perjalanan ke Jatiroto. Dalam perlawanan di Jatiroto ini gugurlah Letnan Soekarto. Pada waktu itu karena posisi pasukannya sudah terjepit Letnan Soekarto berusaha mengadakan penghancuran atas pabrik Jatiroto. Namun karena diketahui oleh pasukan Belanda, akhirnya letnan Soekarto tertembak dan gugur. Jatiroto jatuh pada tanggal 27 Juli 1947.

Di daerah timur ini Belanda berusaha mengambil alih pabrik-pabrik yang ada. Sehingga pabrik gula Semboro berusaha diambil alih Belanda. Selain mengambil alih pabrik gula, Belanda juga menguasai Balung, Kencong. Daerah ini berhasil diduduki Belanda tanggal 27 Juli 1947, sedangkan Ambulu dikuasai tanggal 28 Juli 1947. Dari Jember dan dari Kalibaru, Belanda mengadakan gerakan merebut kota-kota Kalisat dan Majang. Kedua kota ini masing-masing jatuh tanggal 21 Juli 1947 dan 23 Juli 1947.

Dikuasainya wilayah-wilayah tersebut oleh Belanda, berarti hampir seluruh wilayah Besuki telah dikuasai Belanda. Sehingga tinggal Asem Bagus saja yang belum dikuasai oleh Belanda. Asem Bagus menjadi sasaran terakhir pendudukan Belanda di wilayah Besuki. Untuk menduduki Asem Bagus ini, Belanda pada bulan September 1947 mengadakan serangan dari jurusan Situbondo. Belanda dapat merebut Kota Asem Bagus setelah berhasil mematahkan pertahanan dan perlawanan Letnan Hartojo dan perlawanan dari Asmito. Masing-masing di daerah Curah Kalak dan Ardjasa. Keberhasilan Belanda menduduki kota terakhir Asem Bagus ini, berarti Belanda telah berhasil menguasai wilayah Besuki secara tuntas selama Perang Agresi Pertama.

#### **4.5 Kisah Gerbong Maut**

Peristiwa gerbong maut ini diawali ketika pasukan Belanda telah berhasil menduduki Bondowoso. Pada tanggal 22 Pebruari 1947 pasukan-pasukan Belanda menyerang Bondowoso dan berhasil mendudukinya. Pasukan Republik mundur ke gunung-gunung dan melanjutkan perjuangan secara gerilya. Para pemuda pejuang tidak tinggal diam. Hampir setiap malam mereka melakukan serangan-serangan ke markas VDMB (*Veiligheids Dienst Mariniers Brigade*). Akibat serangan-serangan yang dilancarkan secara terus menerus itu menyebabkan persediaan peluru semakin menipis. Untuk mencari peluru maka harus turun gunung atau pergi ke kota. Oleh karena itu Pak Singgih seorang pimpinan Barisan Pemberontak Indonesia pergi ke kota dan berhasil menjalin hubungan dengan seorang anggota VDMB dan berhasil mendapatkan tambahan peluru. Meskipun kegiatan itu berlangsung secara rahasia namun Belanda berhasil mencium gelagat penyelewengan tersebut. Singgih berhasil disergap ketika sedang membagi-bagikan peluru di rumahnya. Ia tidak berhasil mengadakan perlawanan karena rumahnya telah dikepung Belanda dengan ketat. Singgih ditangkap jam 09.00 pagi tanggal 20 September 1947. Sejak hari itu Singgih dan kawan-kawan seperjuangannya mengalami siksaan berat di tahanan. Mula-mula mereka disekap dalam WC selama beberapa hari setelah itu barulah dipindahkan ke penjara Bondowoso.

Selain Singgih pejuang Boeharnuddin mempunyai pengalaman yang lain bagaimana ia bisa ditangkap Belanda. Pada saat itu Boeharnuddin dengan para pejuang lainnya berusaha meninggalkan Kota Jember untuk melakukan perang gerilya di hutan-hutan. Berbulan-bulan ia melakukan penyerbuan dan menghadang tentara Belanda, maju untuk mengadakan penyergapan Belanda dan mundur setelah berhasil mengadakan penyergapan.

Boerhanuddin bukan saja tugasnya mengadakan penyerangan, tetapi juga mencari senjata dan bahan makanan lainnya untuk para pejuang. Dalam berjuang melawan Belanda di hutan-hutan, bersama-sama Boerhanuddin antara lain

R. Badroessapari, Sutjipto Yudo Dihadjo, Majend. Magenda. Tepatnya tanggal 23 November 1947 Boerhanuddin bersama pejuang-pejuang republik sedang beristirahat setelah melakukan tugas gerilya. Secara mendadak disergap oleh Belanda. Boeharnuddin bersama-sama sekitar 100 orang pejuang ditangkap Belanda. Para tahanan disiksa di luar peri kemanusiaan. Jam 15.00 para tawanan digiring dengan berbaris menuju stasiun Bondowoso untuk diangkut ke suatu tempat. Ternyata kereta api dari Banyuwangi tiba jam 19.00. Para tawanan dimasukkan di dalam gerbong barang tertutup dengan dibagi dalam tiga kelompok. Kelompok pertama terdiri dari 24 orang, kedua 36 orang dan kelompok ketiga sebanyak 40 orang termasuk Boeharnuddin. Dalam perjalanan yang praktis dengan udara pengap, mulailah tragedi terjadi. Banyak para tawanan yang sudah tidak tahan lagi menahan rasa hausnya, mulailah para tawanan menggendor pintu kereta tertutup untuk minta minum. Namun jawaban yang diberikan Belanda adalah "boleh minum peluru".

Suasana dalam gerbong sudah tidak bisa dibayangkan, satu demi satu mulai berguguran. Kebanyakan yang masih selamat adalah karena minum air seninya sendiri. Memasuki stasiun Pasuruan para tawanan sudah tak kuasa berdiri, yang masih bergerak adalah mereka yang dapat memeras keringatnya untuk diminum, termasuk Boeharnuddin yang selalu memeras keringatnya untuk diminum. Menjelang stasiun Bangil, Boeharnuddin mencoba bergelimpangan mencari sesuatu. Namun hanya mayat-mayat kawannya yang bergelimpangan dalam gerbong. Antara sadar dan tidak Boeharnuddin meraba sesuatu benda yang bulat, ditimbang dan diraba ternyata rambutan. Sebuah rambutan itu dimasukkan ke dalam mulutnya untuk menahan rasa haus sampai memasuki stasiun Wonokromo. Kereta sampai di stasiun Wonokromo sekitar pukul 13.00, jadi kereta sudah berjalan sekitar 19 jam dari stasiun Bondowoso.

Memasuki stasiun Wonokromo, gerbong para tawanan dibuka ternyata tak seorangpun yang keluar karena tak kuasa untuk berdiri. Boeharnuddin bersama Karsono dengan sisa kekuatannya

merangkak keluar dan mulai berteriak-teriak kepada tentara Belanda mengatakan bahwa semua orang telah tewas. Namun Belanda tidak mempercayainya. Semua tawanan mulai disepak dikeluarkan dari gerbong yang ternyata semua tawanan sudah tidak mampu berdiri lagi. Merasa sebagai tentara, maka Boeharnuddin lari mencari air tanpa memperdulikan bahaya apa yang akan menimpa dirinya. Dan air didapat dari talang kereta api dan mulailah Boeharnuddin dengan sisa-sisa kekuatannya memberikan air kepada tawanan lainnya yang masih tergeletak. Dengan kekuatan seadanya maka para tawanan disuruh untuk mengumpulkan tawanan yang sudah meninggal. Tawanan yang meninggal berjumlah 46 orang sedangkan yang sekarat berjumlah 56 orang. Mayat dikumpulkan dan ditumpuk di depan stasiun Wonokromo, layak sebuah onggokan barang. Semua mayat setelah itu diangkut dengan truk militer ke rumah sakit Karang Menjangan. Para tawanan yang masih hidup mulai dikumpulkan di penjara Bubutan. Karena Boeharnuddin yang semula mengaku sebagai tentara, maka bersama Karsono diserahi tugas sebagai kepala tawanan yang tugasnya memegang kunci dan melayani para tawanan.

Di Bubutan ke-54 tawanan disepak selama 5 bulan dan akhirnya dipindah ke penjara Klakah sampai Belanda bertekuk lutut. Sepulang dari penjara Klakah, Boeharnuddin mulai kehilangan keseimbangan fisiknya. Makannya hanya sekedar pemberian dari saudara-saudara dan teman-temannya yang simpatik atas perjuangannya. Adapun nama-nama tawanan yang dianggap terlibat dalam gerbong maut adalah:

- |                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. Mohammad Alwi           | 10. Abdulrachman           |
| 2. Soewandono              | 11. P Tayib alias Adam     |
| 3. Soeparto                | 12. Ali                    |
| 4. Rasmin                  | 13. Parto                  |
| 5. Rasimin                 | 14. Soewardi               |
| 6. Sidik                   | 15. P. Singgih             |
| 7. Ismail alias P Wir      | 16. Pasik                  |
| 8. Satamin alias Brotojoyo | 17. P. Tima alias Duramaan |
| 9. P. Sami alias Dulhakar  | 18. Sadang Radikin         |

19. Hasan Assagaf
20. Sahar alias S. Abdoer
21. Endin
22. Astrodiredjo
23. P. Arjono
24. Misradin
25. Abd. Maksar
26. Arnimo
27. Niman
28. R. Koesmar alias Nyotoprawiro
29. Soekawi
30. P. Yahya alias Matra'is
31. Tallip
32. P. Mochdar alias Saleh
33. Koestidjo
34. Oewi
35. Asmawi
36. Pangemanan alias Longkang Hendrik
37. Soeharto
38. P. Kamar alias Sahri
39. Arijadi
40. Wirotu
41. Moegiman alias Hadiwarsito
42. Sajidiman
43. Sali alias Suryopranowo
44. Wirjopranoto alias Safuddin
45. Sahawi alias P. Noorsid
46. Awi
47. P. Rose alias Mistar
48. Soeparjomo alias Dirjoatmojo
49. Soetedjo
50. Asboen alias Samak
51. Sidin
52. Roemin
53. Akmi alias Sariman
54. P. Hun alias Sarman
55. P. Aris alias Abdulgafar
56. P. Soesman alias Soeri
57. P. Beng alias Soebahar
58. Sihah alias P. Supar
59. P. Hari alias Sahwi
60. P. Soewoto alias Sishadi
61. Asmono alias Durachman
62. P. Soewoto alias Sishadi
63. P. Soerakmo alias Djatim
64. P. Soewarti alias Djono
65. Koes alias Durachim
66. P. Pakmina alias Djami
67. P. Soeadri alias Mojo
68. P. satomo alias Dulkali
69. P. Marjani alias Mai
70. P. Rais alias Sahi
71. H. Anwar alias Ali
72. P. Murtami alias Maria
73. P. Mistam alias sarbudin
74. P. Achamad alias Ramidin
75. P. Ti alias Misnadin
76. Anwani alias Yahya
77. Salim
78. Gadang Tawar
79. P. Soenandar alias Soedarmo
80. Reksowono alias P. Dahnan
81. Dai
82. H. Syamsuri
83. Soedarjo
84. Koeswari
85. Dullah
86. Abduljaman
87. Tajib
88. Masdar
89. P. Soewari alias Asim
90. P. Soetijo
91. P. Soedjino
92. P. Soewari alias Soemarto
93. P. Roe alias Moenawar
94. P. Pasmon alias Tahir
95. Soewardi
96. Sa'id
97. Moesappa
98. Moestapa

Nama-nama tersebut didaftar oleh Belanda sebagai orang yang dianggap salah karena bertindak subversif, sehingga membahayakan kedudukan pemerintahan Belanda. Mereka ini semua kemudian ditahan oleh Belanda dengan dikeluarkannya surat penahanan oleh Dinas Keamanan Militer yang bunyinya: (terjemahannya)

**DINAS KEAMANAN  
Brigade Militer  
SHK-IV Bondowoso**

**SURAT PERINTAH UNTUK PENAHANAN SEMENTARA**

Komandan Dinas Keamanan Brigade Marinir SHK-IV dengan mempertimbangkan bahwa tindakan penahanan ini dilakukan demi kepentingan pemeriksaan begitu pula untuk pencegahan mengulangi perbuatannya ataupun untuk pencegahan usaha untuk melarikan diri maka dianggap sangat perlu untuk mengambil tindakan memerintahkan menyekap para tersangka tersebut di atas ke dalam Rumah Tahanan di jalan Werf (Galangan Kapal), Surabaya untuk waktu yang tidak terbatas.

**Bondowoso, 22 November 1947**

**Komandan Dinas Keamanan Brigade Marinir  
SHK-IV**

**(ttd J. Van Den Doerpe)  
Letnan II Marinir**

Hari ini,..... 1946, surat perintah tersebut di atas dilaksanakan dan para tersangka telah kami ambil alih.

**Direktur Rumah Tahanan**

Selama setengah bulan para tawanan menjadi penghuni penjara Bubutan. Mereka dijaga keras dan tidak diperbolehkan berkumpul dengan tawanan lainnya. Barang siapa mendekati mereka dalam jarak 10 m akan ditembak mati. Mengenai mayat-mayat korban gerbong maut tidaklah diketahui dengan pasti dimana mereka dikuburkan. Ada yang mengatakan jenazahnya dibuang ke Sungai Wonokromo ada yang mengatakan bahwa mereka di kuburkan di Sidoarjo.

Peristiwa biadab diluar perikemanusiaan tersebut mula-mula dirahasiakan oleh algojo-algojo Belanda, akan tetapi beberapa hari kemudian Radio Australia menyiarkan tragedi itu sehingga dunia internasional mengetahui kekejaman tentara Belanda terhadap rakyat Indonesia yang secara sah telah merdeka. Hal ini membuat perubahan sedikit perilaku kekejaman mereka dengan jalan merubah cara pengangkutan tawanan dari pengangkutan tertutup menjadi pengangkutan terbuka, meskipun para tawanan tetap saja dikerangkeng dan diborgol.

Untuk mengenang kebiadaban Belanda tersebut maka pemerintah daerah membangun sebuah Monumen Gerbong Maut. Arsitektur bangunan monumen merupakan gundukan berbentuk trapesium berukuran panjang 9,5 m lebar 5,25 m dan tinggi 2,5 m. pada bagian kanan dan kiri dinding terdapat relief yang menggambarkan pertempuran antara tentara republik melawan Belanda. Di atas gundukan trapesium terdapat patung-patung tentara Indonesia yang berjumlah 13 dan menggambarkan sikap menyerbu musuh. Diantara patung-patung tersebut ada yang membawa senjata panah, senapan, bambu runcing, pedang, dan keris. Pada komposisi letak patung para pejuang tersebut seolah-olah menggambarkan bersatunya rakyat dengan tentara republik. Selain patung-patung terdapat replika gerbong maut berwarna hitam, tanpa jendela sedikit pun. Monumen Gerbong Maut tersebut berukuran panjang 3,5 m, lebar 2,5 m, dan tinggi 3 m.

#### **4.6 Jawa Timur Kembali ke Pangkuan Republik Indonesia**

Aksi Militer Belanda kedua berakhir di Jawa Timur ketika pada tanggal 7 Mei 1949 perjuangan dalam bidang diplomasi telah menghasilkan suatu persetujuan Indonesia-Belanda yang dikenal dengan persetujuan Roem-Roiyen. Sebagai tindak lanjut dari persetujuan tersebut maka pada tanggal 8 Agustus 1949, keluarlah perintah penghentian tembak menembak yang untuk daerah Jawa mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 1949 malam.

Guna menjelaskan pelaksanaan tersebut maka pada tanggal 8 Agustus 1949 datanglah Letkol. Soeharto utusan pemerintah pusat di Nganjuk. Setelah mendapat penjelasan tersebut maka pada tanggal 13 Agustus 1949 Komandan Komando Divisi TNI mengadakan pertemuan dengan Komando A Divisi Belanda di Trowulan. Maksud dari pertemuan adalah untuk membicarakan pelaksanaan gencatan senjata, tetapi pertemuan tersebut ternyata tidak membawa sesuatu hasil. Oleh karena itu pertemuan tersebut kemudian dilanjutkan pada tanggal 22 Agustus 1949 di Kediri. Sebagai kelanjutannya pada tanggal 1 September 1949 dibentuklah *Local Joint Committee* yang mempunyai tugas sebagai penghubung antara pihak Indonesia dan tentara Belanda, serta tugas untuk membicarakan penjagaan keamanan dan pelepasan kembali daerah-daerah yang dikuasai Belanda.

Setelah Pengakuan Kedaulatan, ternyata bentuk Negara Republik Indonesia berubah menjadi Negara Republik Indonesia Serikat yang terdiri dari 7 negara bagian. Adanya bentuk negara federal yang kebanyakan di dalamnya terdapat negara-negara bagian buatan Belanda menimbulkan perasaan yang tidak puas bagi sebagian besar rakyat Indonesia yang menginginkan terciptanya negara kesatuan. Timbullah pergolakan rakyat di seluruh Indonesia untuk bergabung lagi dengan Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Yogyakarta.

Di Jawa Timur yaitu Negara Jawa Timur dan Negara Madura juga berusaha untuk meleburkan diri dengan Republik Indonesia. Negara Jawa Timur dan Negara Madura berubah

status menjadi negara ketika, pada tanggal 23 November 1948 Konperensi Bondowoso dalam sebuah resolusinya meminta status negara bagi daerah Jawa Timur. Tiga hari kemudian diakuilah daerah Jawa Timur sebagai negara sedang Konperensi Bondowoso diakui sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Sementara oleh pemerintah Belanda di Indonesia. namun setelah beberapa bulan berjalan akhirnya Negara Jawa Timur bubar dan bergabung kembali dengan Negara Republik Indonesia bersamaan dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1950.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Sejarah Revolusi Kemerdekaan di Indonesia antara 1945 – 1950 pada dasarnya adalah usaha perlawanan rakyat Indonesia melawan Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia. Hal tersebut sangatlah bertentangan dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sementara itu Belanda meskipun rakyat Indonesia sudah memproklamirkan kemerdekaannya Belanda merasa Indonesia adalah wilayahnya. Dengan adanya 2 persepsi terhadap satu wilayah Indonesia itu maka terjadilah perang antara 2 kekuatan yang saling bermusuhan yaitu Indonesia dan Belanda.

Sehubungan adanya claim terhadap wilayah Indonesia tersebut maka setelah proklamasi di Indonesia antara 1945 – 1950 terjadi perang yang meliputi hampir seluruh wilayah Indonesia. Perang-perang tersebut terjadi pertama-tama dipicu oleh kedatangan Belanda yang membonceng tentara Sekutu yang akan melucuti tentara Jepang yang kalah dalam perang dunia kedua. Hal ini tentu saja menimbulkan perang dimana-mana. Karena belum berhasil maka Belanda mengadakan serangan Agresi Pertama tanggal 21 Juli 1947. Perang ini Belanda menyebutnya sebagai Aksi Polisional Pertama. Serangan Belanda

mengakibatkan ibukota Republik Indonesia pindah ke Yogyakarta karena ibukota Jakarta dirasa sudah tidak aman lagi. Agresi pertama ini berakhir dengan adanya Perjanjian Renville yang isinya sangat merugikan Indonesia. Namun perjanjian ini dilanggar oleh Belanda dan mereka mengadakan Aksi Agresi kedua pada 19 Desember 1948. Pada saat agresi ini Indonesia hampir saja dikuasai oleh Belanda, namun berkat usaha diplomasi yang gigih, akhirnya atas peran besar PBB, Indonesia dan Belanda mengadakan perundingan.

Pertempuran-pertempuran di daerah-daerah seluruh Indonesia umumnya mempunyai corak yang hampir sama yaitu dengan melibatkan tentara dan rakyat dengan menggunakan peralatan perang seadanya. Begitu juga di daerah Besuki, suatu wilayah di ujung timur Pulau Jawa yang menjadi bagian dari wilayah Propinsi Jawa Timur. Di daerah ini pertempuran antara rakyat dengan Belanda berlangsung sengit. Namun kekalahan selalu ada pada pihak tentara republik. Ada beberapa hal yang membuat pasukan republik selalu kalah melawan Belanda karena kurangnya koordinasi secara matang dalam mengadakan serangan, kedua karena persenjataan pasukan republik yang sangat minim dan tidak memadai dibandingkan dengan senjata yang dipakai pihak musuh. Jadi sebenarnya perlawanan pasukan republik terhadap Belanda lebih merupakan upaya defensif untuk mempertahankan wilayahnya dari musuh dengan bermodalkan semangat juang yang tinggi dan tanpa mengenal lelah. Ketiga pasukan republik yang terdiri dari laskar dan tentara sebagian besar kurang terlatih.

Akibat perang rakyat ini juga mempengaruhi bidang pemerintahan di daerah. Apalagi setelah itu Belanda melalui Van Mook berusaha memecah belah wilayah Indonesia dengan idenya negara federal. Dengan ide tersebut berarti telah berhasil memecah belah kekuatan rakyat. Karena ada sebagian yang mengizinkan tetap mengikuti Republik Indonesia ada sebagian yang menginginkan masuk Negara Republik Indonesia Serikat. Hasil dari politik Van Mook tersebut adalah munculnya negara-negara kecil seperti Negara Indonesia Timur, Negara Madura

dan lain-lain. Selain di tingkat pusat, di tingkat daerah juga terjadi perubahan-perubahan birokrasi pemerintahan.

Wilayah Besuki yang merupakan wilayah ujung timur Pulau Jawa, Belanda berusaha sangat gigih untuk menguasai wilayah tersebut. Karena daerah Besuki dan sekitarnya merupakan daerah yang subur terutama padi dan tembakau. Bahkan pada waktu itu padi Jawa Timur menjadi penyumbang terbesar dalam stok pangan nasional bahkan untuk politik diplomasi beras Indonesia ke India. Sedangkan tembakau wilayah Besuki merupakan penghasil tembakau terbesar di Jawa Timur, sehingga di daerah ini banyak terdapat pabrik rokok. Selain itu di daerah Besuki juga terdapat tanaman tebu. Selain keadaan hasil bumi yang cukup melimpah, wilayah Besuki merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan Propinsi Bali. Jadi yang menguasai Banyuwangi dan Pelabuhan Ketapang maka akses ke Pulau Bali menjadi sangat mudah. Karena waktu itu Bali sudah merupakan wilayah kawasan wisata yang sangat penting di dunia.

Dengan melihat kondisi geografis seperti itu maka Belanda setelah menaklukkan Surabaya berusaha dengan keras untuk menduduki kota-kota Banyuwangi, Probolinggo, Pasuruan, Besuki dan Asem Bagus. Namun usaha Belanda di wilayah-wilayah tersebut tidak dengan mudah berhasil. Karena rakyat bersama-sama tentara berusaha dengan gigih untuk mempertahankan wilayah-wilayah tersebut. Meskipun pada akhirnya wilayah-wilayah tersebut berhasil diduduki, namun perjuangan rakyat di Besuki tidak bisa dianggap ringan. Karena dengan bermodalkan senjata seadanya rakyat telah berhasil mengadakan perlawanan dengan gigih.

Didudukinya kota-kota besar di Besuki maka secara umum perlawanan rakyat telah dapat dikuasai. Sedangkan rakyat hanya mengadakan perlawanan gerilya di gunung-gunung dan di hutan-hutan. Setelah melalui perjuangan bersenjata dan diplomasi akhirnya wilayah-wilayah yang telah dikuasai oleh Belanda dapat kembali dikuasai oleh Republik Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus Darto Harnoko, *Besuki 1830 - 1870 Suatu Kajian Sejarah Sosial Ekonomi Abad 19*, Yogyakarta: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, 1998/1999, berupa naskah.
- Depdikbud, *Sejarah Daerah Jawa Timur*, Jakarta: Depdikbud, 1978.
- Depdikbud, *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jawa Timur*, Jakarta: Depdikbud, 1977/1978
- H. Ahmad Yunus, dkk, *Nilai-nilai Budaya Dalam Kehidupan Pesantren di Daerah Situbondo Jawa Timur*, Jakarta: Depdikbud, 1994/1995.
- Heru Sukadri, dkk, *Sejarah Revolusi Kemerdekaan 1945 - 1949 Daerah Jawa Timur*, Jakarta: Depdikbud, 1991.
- Sesdam VIII Brawidjaja, *Sam Karya Bhirawa Anoraga Sejarah Militer Kodam VIII/Brawidjaja*, Malang, 1968.
- Sudarno, dkk, *Sejarah Pemerintahan Militer dan Peran Pamong Praja di Jawa Timur Selama Perjuangan Fisik 1945 - 1950*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Tashadi, dkk, *Peranan Desa Dalam Perjuangan Kemerdekaan: di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jakarta: Depdikbud, 1992.

